



# RENTEK L2T2

## KABUPATEN

### SUMBAWA BARAT



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Proporsi penduduk terhadap sanitasi secara nasional hingga tahun 2018, capaian pembangunan sektor air limbah meliputi: akses layak mencapai 74,58% (termasuk di dalamnya 7,42% akses aman), akses dasar sebesar 16,7%, dan belum memiliki akses masih sebesar 9,36%. (BPS, 2018).

Berdasarkan target SDGs, sektor sanitasi/air limbah terdapat di dalam agenda nomor 6 (air limbah domestik). Perubahan dari MDGs ke SDGs untuk sektor pengelolaan air limbah domestik disertai dengan agenda peningkatan kualitas pengelolaan layanan sanitasi, terutama dengan adanya target kualitas akses aman (*safely managed sanitation*) yang telah mempertimbangkan kualitas effluent dengan tujuan perlindungan lingkungan, selain juga untuk perlindungan kesehatan sebagai tujuan dasarnya.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), Pemerintah telah menetapkan arah dan kebijakan serta target nasional pembangunan sektor sanitasi. Secara nasional target pembangunan sanitasi hingga tahun 2024 ditetapkan akses air limbah domestik yang layak menjadi 90% (termasuk 15% akses aman di dalamnya), dan 0% BABS.

Berdasarkan data Pokja AMPL Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sumber data BPS, STBM dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah KemenPUPR bahwa akses sanitasi layak sektor air limbah domestik baru mencapai 78,8% dan termasuk 4,29% akses aman, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat sudah mencapai 99,9% akses sanitasi layak dan 6,8% akses aman.

Kabupaten Sumbawa Barat telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan/*Open Defecation Free (ODF)* pada tahun 2017. Berdasarkan data Laporan Status Sanitasi (LSS) sektor air limbah domestik Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019, 0% rumah tangga yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), sebesar 93,57% menggunakan SPALD setempat individual, Cubluk/tangki septik tidak layak (akses dasar) sebesar 31,17%, SPALD setempat skala komunal sebesar 4,88%, SPALD-T/permukiman berbasis masyarakat sebesar 1,55 %, dengan akses aman mencapai 4,16%.

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah domestik, khususnya dalam pencapaian target sanitasi layak dan aman di Kab. Sumbawa Barat, maka diperlukan Rencana Teknis Implementasi L2T2 yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak dalam pembangunan sanitasi.

Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan lumpur tinja harus dilakukan secara pro aktif dan terintegrasi secara menyeluruh, dimulai dari sumber lumpur tinja di tangki septik, penyedotan, dan pengangkutan lumpur tinja untuk diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sampai dengan pemanfaatan produk olahan. Lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat/ tangki septik harus diangkut dan diolah di IPLT. Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan lumpur tinja dan membentuk sistem yang terpadu ini, maka dibutuhkan suatu pelayanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal.

Dengan adanya Rencana Teknis Implementasi L2T2 tersebut, diharapkan optimalisasi pelayanan lumpur tinja dan penerapan L2T2 oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan lebih meningkatkan pelayanan sanitasi, khususnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat (SPALD-S), serta lebih menjamin adanya keberfungsian dan keberlanjutan IPLT, baik dari sisi teknis maupun non teknis.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari kegiatan ini adalah Menyusun Rencana Teknis Implementasi L2T2 di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pelayanan sanitasi sistem setempat dan menjamin keberfungsian serta keberlanjutan IPLT yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

## **1.3 SASARAN**

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penyusun sekaligus pengguna dalam optimalisasi pelayanan lumpur tinjanya baik melalui penerapan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)/ sistem on-call maupun penerapan L2T2 di daerahnya.

## **1.4 RUANG LINGKUP**

Lingkup tugas Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Lumpur Tinja di 5 Kab/Kota meliputi:

1. Memetakan dan mengevaluasi kondisi eksisting pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja yang telah berjalan;
2. Menyusun strategi peningkatan pelayanan sistem on-call /L2T3 dan L2T2;
3. Menyusun rencana teknis dalam optimalisasi pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan sistem on-call / L2T3 dan LLTT;
4. Menyusun rencana jangka pendek layanan skala terbatas di area pilot L2T2 dan identifikasi kebutuhannya;
5. Menyusun rencana jangka menengah perluasan layanan L2T2 di Kabupaten Sumbawa Barat dan identifikasi kebutuhannya hingga tahun 2024;

## **1.5 SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Teknis Implementasi L2T2 Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN** membahas mengenai latar belakang kegiatan ini, maksud, tujuan dan sasaran serta ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Implementasi L2T2.

**BAB 2**  
**GAMBARAN UMUM**  
**WILAYAH** membahas mengenai kondisi geografi, topografi, administrasi, jumlah penduduk dan persebarannya per Kecamatan, cakupan pelayanan air bersih (PDAM), layanan persampahan. Dilengkapi dengan peta administrasi, tabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota, sebaran kepadatan penduduk per kecamatan.

**BAB 3**  
**KONDISI EKSTING**  
**PENGELOLAAN AIR**  
**LIMBAH DAN LUMPUR**  
**TINJA** membahas mengenai kondisi cakupan pelayanan, wilayah pelayanan, aspek teknis dan non teknis dari pengelolaan air limbah dan lumpur tinja eksisting.

**BAB 4**  
**RENCANA TAHAPAN**  
**PENGEMBANGAN**  
**LAYANA LUMPUR TINJA** membahas mengenai jenis layanan lumpur tinja, rencana target capaian akses sanitasi aman, dan target layanan lumpur tinja terjadwal beserta cakupan wilayah layanan. Dilengkapi dengan rencana pengembangan aspek teknis dan non-teknis

**BAB 5**  
**RENCANA UJI COBA**  
**LLTT TAHUN 2021 DAN**  
**PERLUASANNYA** membahas mengenai rencana kegiatan uji coba Layanan Lumpur Tinja Terjadwal di area terbatas (pilot) dan rencana *scaling-up*.

**BAB 6**  
**MONITORING DAN**  
**EVALUASI** membahas mengenai rencana Monev implementasi LLTT mulai dari uji coba skala terbatas (pilot) hingga perluasan implementasi beserta capaian strategis tahunan.



## BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

### 2.1 ADMINISTRASI DAN KEPENDUDUKAN

Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Sesuai Undang-Undang No. 30 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri dari 8 Kecamatan dengan 64 desa dan kelurahan dengan luas wilayah adalah 184.902 hektar (184,902 km<sup>2</sup>) dengan komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 11.737 ha dan tanah kering seluas 173.165 ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Kabupaten Sumbawa Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah Adm (Ha)	Luas Wilayah Terbangun (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kelurahan/ Desa
1	Sekongkang	37,242	1,986	7
2	Jereweh	26,019	2,561	4
3	Maluk	9,242	1,654	5
4	Taliwang	37,593	3,350	15
5	Brang Ene	14,090	807	6
6	Brang Rea	21,207	1,334	9
7	Seteluk	23,621	823	10
8	Poto Tano	15,888	265	8
<b>Jumlah</b>		<b>184,902</b>	<b>12,780</b>	<b>64</b>

Sumber: Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka, 2018

Tabel 2.1. terlihat Kecamatan Taliwang merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas 37.593 Ha atau setara dengan 20.42% dari total luas Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan, Kecamatan Maluk adalah wilayah yang mempunyai luas terkecil yaitu 9.242 ha atau 5,02% dari total luas Kabupaten Sumbawa Barat.

Luas wilayah terbangun adalah suatu area wilayah yang terdiri dari wilayah permukiman penduduk, area kegiatan perekonomian, area pemerintahan dan lainnya. Dari Tabel 1, terlihat bahwa Kecamatan Taliwang merupakan kecamatan yang memiliki persentase luas terbangun paling tinggi yaitu mencapai 26,21% dari total luas wilayahnya, diikuti oleh Kecamatan Jereweh, Kecamatan Sekongkang serta Kecamatan Maluk. Pada saat ini Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano serta Kecamatan Seteluk merupakan Kecamatan dengan katagori CBD yaitu wilayah yang merupakan pusat kegiatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kecamatan Taliwang merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak, yaitu 15 desa/kelurahan. Selanjutnya diikuti Kecamatan Seteluk (10 desa/kelurahan) dan Kecamatan Brang Rea sebanyak 9 desa/kelurahan. Sebaran jumlah desa/kelurahan dan nama desa/kelurahan di setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.2 Sebaran Jumlah dan Nama Kelurahan/desa Kabupaten Sumbawa Barat

No	Kecamatan	Jumlah Kel-	Nama kelurahan
1	Sekongkang	7	Sekongkang Bawah, Sekongkang Atas, Tongo, Ai Kangkung, Tatar, Talonang Baru, Kemuning
2	Jereweh	4	Belo, Goa, Beru, Dasan Anyar
3	Maluk	5	Maluk, Benete, Bukit Damai, Mantun, Pasir Putih
4	Taliwang	15	Latar Liang, Labuan Lalar, Kel. Kuang, Labuan Kertasari, Kel. Bugis, Kel. Dalam, Kel. Menala, Kel. Sampir, Seloto, Tamekan, Banjar, Batu Putih, Telaga Bertong, Sermong, Kel. Arab Kenangan
5	Brang Ene	6	Mura, Kalimantanong, Lampok, Manemeng, Mujahidin, Mataiyang
6	Brang Rea	9	Sapugara Bree, Beru, Tepas, Mangkat Monteh, Seminar Salit, Tepas Sepakat, Moteng, Lamuntet, Rarak Rogis
7	Seteluk	10	Kelanir, Meraran, Air Suning, Rempe, Tapir, Seteluk Atas, Seteluk Tengah, Lamusung, Loka, Seran
8	Poto Tano	8	Senayan, Mantar, Kiantar, Poto Tano, Tambak Sari, Tuanaya, Tebo, Kokar Lian

Sumber : Instrumen SSK, 2019

## 2.2 KONDISI FISIK DASAR

### 2.2.1 Kondisi Geografis

Lokasi Kabupaten Sumbawa Barat berada di ujung barat pulau Sumbawa, sekaligus sebagai pintu gerbang dari pulau Lombok menuju pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu daerah dari sembilan kabupaten/kota yang berada pada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, tepatnya antara 08°29' dan 9°07' Lintang Selatan dan antara 116°42' sampai dengan 117°05' Bujur Timur

Kabupaten Sumbawa Barat secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten lainnya, yaitu :

1. Batas Utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan;
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Alas.

## 2.2.2 Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat cukup beragam, mulai dari datar, bergelombang curam sampai sangat curam dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1,730 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah dengan topografi sangat curam seluas 93.102 Ha (50.36%) dengan kemiringan lebih dari 40%.

Tabel 2.3 Kondisi Topografi Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Keadaan Topografi	Kemiringan Lahan (%)	Luas (HA)	Luas (%)
1	Datar	0 – 2.00	21.822	11.80
2	Bergelombang	2.01 – 15.00	16.369	8.85
3	Curam	15.01 – 40.00	53.609	28.99
4	Sangat curam	>40.00	93.102	50.35
<b>Total</b>			<b>184.902</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, 2019

## 2.3 RENCANA TATA RUANG DAN TATA GUNA LAHAN

Sesuai dengan PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sumbawa Barat, rencana struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing – masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya.

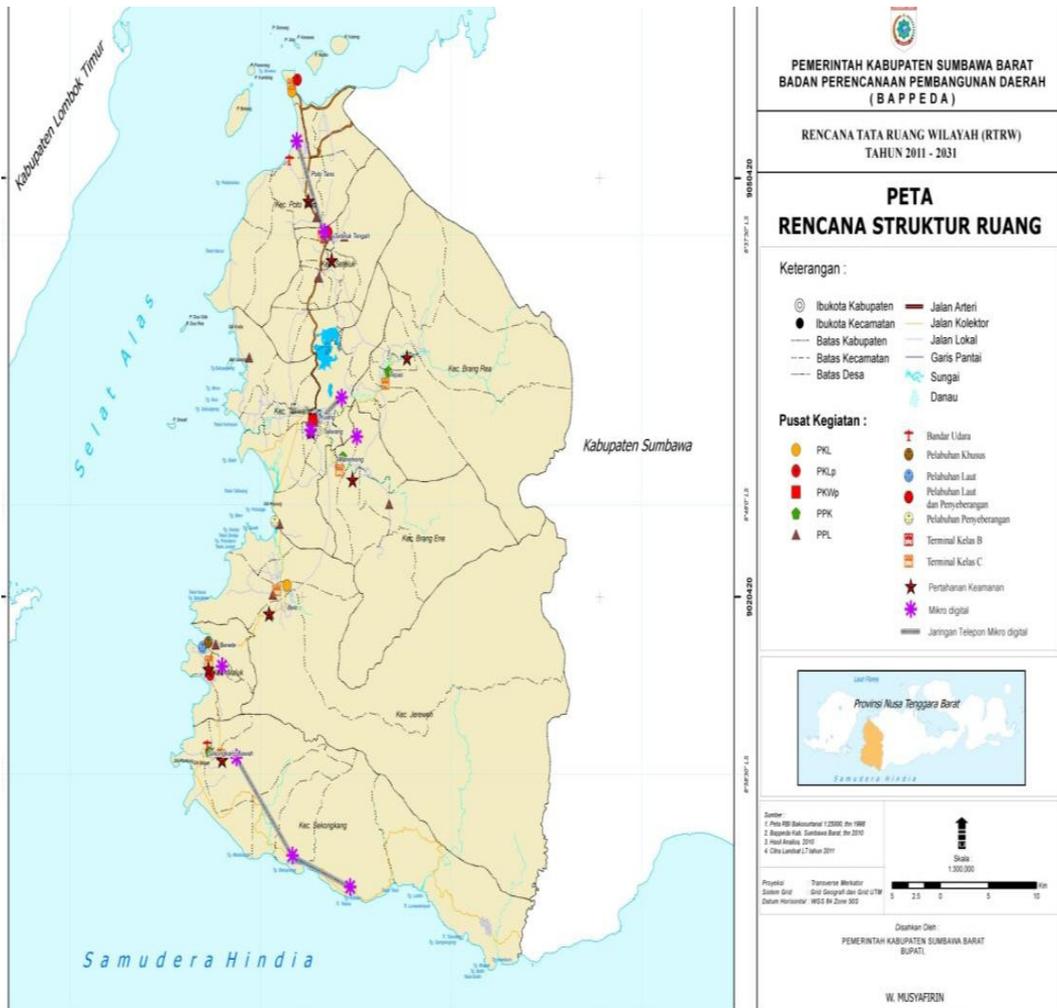
Tabel 2.4 Sistem Perkotaan di Kabupaten Sumbawa Barat

No	Pengembangan Ruang	Kecamatan
<b>A. Sistem perkotaan wilayah Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat</b>		
1.	Kota Taliwang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)	Kecamatan Taliwang
2.	Perkotaan Jereweh sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Maluku
3.	Perkotaan Poto Tano sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kecamatan Poto Tano
<b>B. Sistem perkotaan wilayah Kabupaten</b>		
1.	Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	1. Perkotaan Maluku 2. Perkotaan Seteluk

2.	Ibukota Kecamatan lainnya, yaitu Brang Ene, Brang Rea, dan Sekongkang dijadikan sebagai PPK(Pusat Pelayanan Kawasan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Brang Ene</li> <li>2. Kecamatan Brang Rea</li> <li>3. Kecamatan Sekongkang</li> </ol>
3.	Desa-desa pusat pertumbuhan (DPP) dijadikan sebagai PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senayan</li> <li>2. Kokarlian</li> <li>3. Seteluk Atas</li> <li>4. Ai Suning</li> <li>5. Kertasari</li> <li>6. Labuhan Lalar</li> <li>7. Beru</li> <li>8. Muhajirin</li> <li>9. Dusun Jelenga</li> <li>10. Benete</li> <li>11. Ai Kangkung dan</li> <li>12. Talonang</li> </ol>

Sumber : Perda Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2012

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sumbawa Barat

### 2.3.1 Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kabupaten Sumbawa Barat meliputi rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya, jenis kawasan, lokasi serta luasan, arahan pengembangan, serta penanganan dan pengelolaan kawasan yaitu upaya penanganan dan pengaturannya, hal ini lebih diperlukan bila terdapat konflik peruntukkan.

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

#### a. Jenis dan Kriteria Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan kondisi fisik wilayah meliputi kelerengan, ketinggian, curah hujan, jenis tanah, erodibilitas serta ketebalan top soil, di Kabupaten Sumbawa Barat direncanakan :

Berdasarkan kajian penetapan kawasan lindung yang dilakukan, maka penambahan kawasan resapan air sekaligus dapat dibudidayakan perkebunan tanaman tahunan/ tanaman keras dapat dilakukan secara bertahap. Adapun wilayah yang memerlukan pengembangan hutan atau perkebunan ini meliputi:

- (1) Kecamatan Seteluk
- (2) Kecamatan Jereweh
- (3) Kecamatan Brang Rea
- (4) Kecamatan Sekongkang

b. *Kawasan Hutan Lindung*

Hutan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.

Hutan lindung di Kabupaten Sumbawa Barat seluas ± 66,311.06 ha (RTRW Provinsi ± 66,230.71 ha) yang berada di :

A. KPH Brang Rea :

- 1) Puncak Ngengas RTK 60 seluas ± 3,411.00 ha
- 2) Selalu Legini RTK 59 seluas ± 13,941.24 ha
- 3) Olat Lemusung RTK 91 seluas ± 7,778.90 ha
- 4) Pantai Alas RTK 74 seluas ± 464.10 ha

B. KPH Mataiyang:

- 5) Selalu Legini RTK 59 seluas ± 21,999.71 ha

C. KPH Sejorong:

- 6) Selalu Legini RTK 59 seluas ± 17,115 ha

c. *Kawasan Yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya*

1. Kawasan Bergambut

Di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada Kawasan Bergambut.

2. Kawasan Resapan Air

Berdasarkan perkembangan rencana pola penggunaan lahan kawasan resapan air diprioritaskan pengembangannya tersebar pada kawasan perbukitan di:

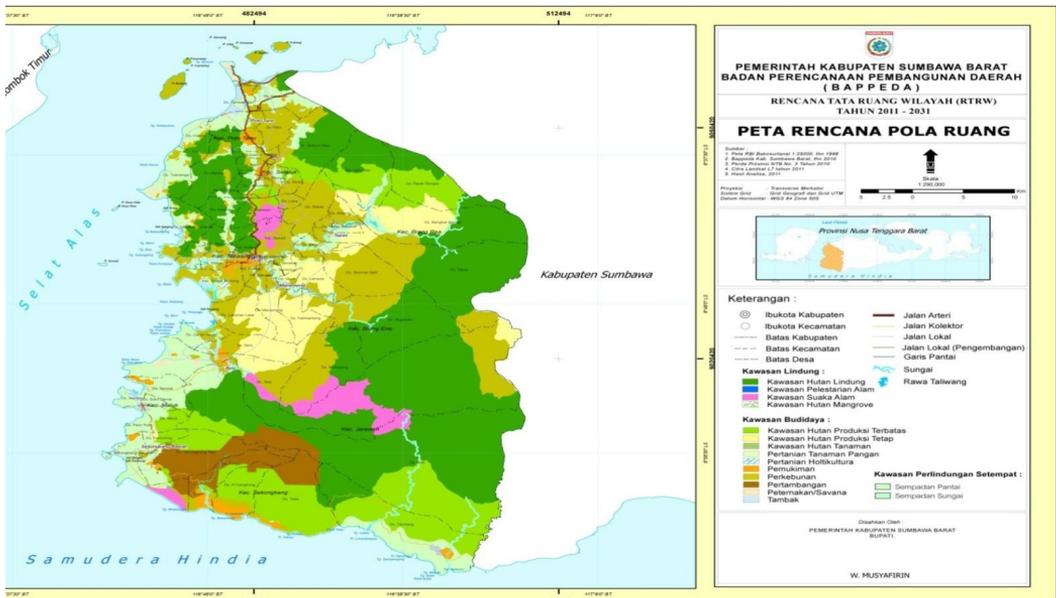
1. Kecamatan Seteluk
2. Kecamatan Jereweh
3. Kecamatan Brang Rea
4. Kecamatan Sekongkang

## Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Tabel 2.5 Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam

No	Nama Kawasan	Luas (ha)
1.	Kawasan Suaka Alam (KSA) Jereweh	± 3,643.17
2.	Kawasan Cagar Alam (CA) Pedauh	± 524.00

Sumber : RTRW KSB 2011 – 2030



Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sumbawa Barat

## 2.4 KEPENDUDUKAN

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat telah mencapai 133,501 jiwa terdiri dari 67,635 laki-laki dan 65,866 perempuan. Dengan melihat luas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 1,849.02 km<sup>2</sup> maka rata-rata kepadatan penduduk KSB adalah sebanyak 602.58 orang per-km<sup>2</sup> dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk KSB Per Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)		Jumlah	%	Sex Ratio	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan					
1.	Sekongkang	4,810	4,626	9,436	7.07	1.04	372.42	25.34
2.	Jereweh	4,843	4,891	9,734	7.29	0.99	260.19	37.41
3.	Maluk	7,123	6,532	13,655	10.23	1.09	92.42	147.75
4.	Taliwang	25,752	25,451	51,203	38.35	1.01	375.93	136.20
5.	Brang Ene	2,998	2,953	5,951	4.46	1.02	140.90	42.24
6.	Brang Rea	7,556	7,136	14,692	11.01	1.05	212.07	69.28
7.	Seteluk	9,068	8,933	18,001	13.48	1.02	236.21	76.21
8.	Poto Tano	5,485	5,344	10,829	8.11	1.03	158.88	68.16
Jumlah		67,635	65,866					602.58

Sumber: Sumbawa Barat Dalam Angka 2016

Laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Sumbawa Barat pertahun selama 5 tahun terakhir sebesar 2.8%. Untuk lebih jelasnya laju pertumbuhan penduduk dan jumlah KK yang diproyeksikan hingga 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa proyeksi penduduk perkotaan terbanyak pada tahun 2021 adalah Kecamatan Taliwang dengan jumlah sebesar 40,292 jiwa (10,381 KK) dengan wilayah pedesaan sebesar 18,147 jiwa (4,537 KK).

## **2.5 SARANA AIR MINUM DAN SANITASI LAINNYA**

### **2.5.1. Sarana Air Bersih**

Pelayanan air bersih Kabupaten Sumbawa Barat saat ini dilayani oleh PDAM dan Non PDAM. Pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai 29,1% yang sudah melayani 12 (dua belas) desa dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kec.Taliwang, Kec. Sekongkang, Kec. Jereweh, Kec. Maluk, Kec. Brang Rea, Kec. Seteluk, Kec. Poto Tano yang dilayani oleh 6 (enam) unit/cabang PDAM yaitu PDAM Pusat Taliwang, Cabang Sekongkang, Cabang Jereweh, Cabang Brang Rea, Cabang Seteluk, dan Cabang Poto Tano. Pelayanan perpipaan Non PDAM dikelola masyarakat sendiri. Saat ini pelayanan perpipaan Non PDAM sudah mencapai 4% yang sudah melayani 21 desa dari 65 desa.

No	Kecamatan	Penduduk 2015 (Jiwa)	KK PDAM	Pelayanan (Jiwa)									
				PDAM	%	Non PDAM	%	PDAM	%	Non PDAM	%	Belum	%
1	Sekongkang	11.191	636	3.180	34,60	-	-	-	-	6.011	65,40	-	-
2	Jereweh	9.462	333	1.665	17,60	95	1,00	-	-	6.131	64,80	1.571	16,60
3	Maluk	13.325	-	-	-	586	4,40	-	-	11.353	85,20	1.386	10,40
4	Taliwang	49.795	4.641	23.204	46,60	1.046	2,10	-	-	24.101	48,40	1.444	2,90
5	Brang Ene	5.778	-	-	-	451	7,80	-	-	4.715	81,60	612	10,60
6	Brang Rea	14.160	1.000	4.998	35,30	496	3,50	-	-	7.830	55,30	835	5,90
7	Seteluk	17.485	213	1.067	6,10	437	2,50	-	-	15.457	88,40	542	3,10
8	Poto Tano	10.528	726	3.632	34,50	2.106	20,00	-	-	2.969	28,20	1.821	17,30

Sumber: RISPAL KSB 2015 dan Analisis Pokja 2016

## 2.5.2 Persampahan

### a. Sistem dan Infrastruktur

Salah satu permasalahan utama yang sering menjadi isu lingkungan yang utama adalah masalah sampah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengelola sampah agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat.

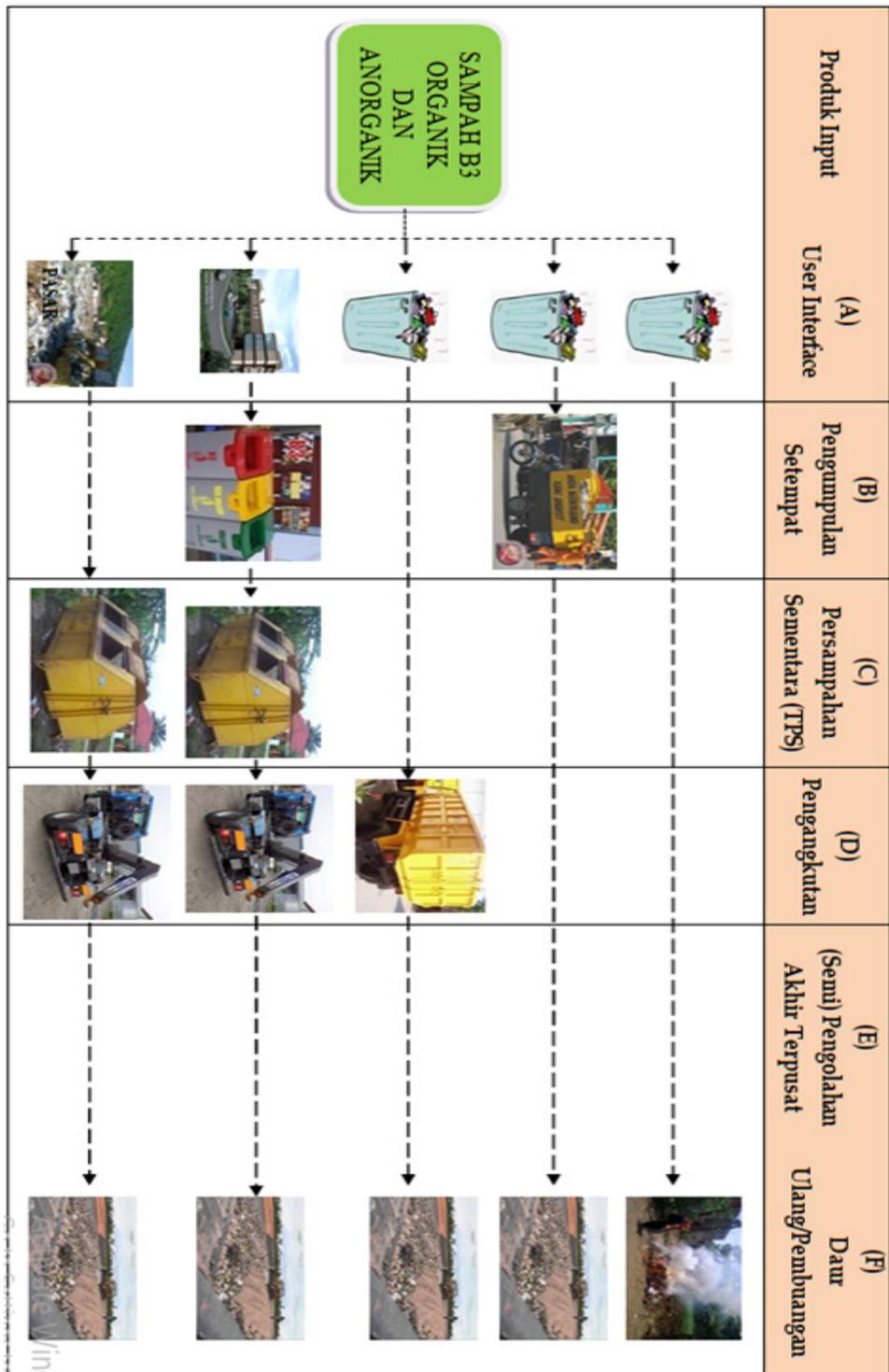
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan 2 (dua) sistem pengelolaan yaitu dengan sistem individual langsung dan sistem individual tidak langsung. Sistem individual langsung yaitu proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan. Sampah dari tiap-tiap sumber akan diambil, dikumpulkan dan langsung diangkut ke tempat pemrosesan atau ke tempat pembuangan akhir sementara. Sistem individual tak langsung yaitu sebelum diangkut ke tempat pemrosesan, atau ke tempat pembuangan akhir, sampah dari masing-masing sumber akan dikumpulkan dahulu oleh sarana pengumpul seperti roda tiga dan diangkut ke TPS. Dalam hal ini, TPS dapat pula berfungsi sebagai lokasi pemrosesan skala kawasan guna mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut ke pemrosesan akhir.

Penanganan limbah padat/sampah di Kabupaten Sumbawa Barat hanya menjangkau beberapa wilayah diantaranya yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Seteluk yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Jereweh ditangani oleh pihak swasta yaitu PT. NNT. TPA Sekongkang hanya melayani untuk Kecamatan Sekongkang, sedangkan TPA Pola Mata melayani Kecamatan Maluk dan Kecamatan Jereweh. Sumber sampah berasal dari pemukiman penduduk (sampah domestik), rumah makan, pasar, pertokoan, taman, perkantoran, rumah sakit/puskesmas dan fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan hasil EHRA juga, pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan dikumpulkan dan dibuang ke TPS oleh petugas pengelolaan sampah sebesar 42.40%, 16.80% keluarga dari jumlah KK sampahnya dibuang ke sungai/kali/laut/danau, sebesar 23.50% sampah dibakar dan sisanya sebesar 17.33% dengan dibuang ke kebun, dikumpulkan oleh kolektor, dibiarkan membusuk dan sebagian lagi tidak tahu. TPA Batu Putih merupakan TPA yang dilengkapi oleh IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) yang bermanfaat untuk mengolah air lindi yang berasal dari tumpukan sampah sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan data instrumen profil Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 sebesar 42.76% (106 m<sup>3</sup>/hr) sampah terproses di TPA Batu Putih, dan 57.24% (141.90 m<sup>3</sup>/hr) sampah domestik diolah disumber (dibakar/ditimbun/dibuang ke sungai). TPA Sekongkang menangani 34.28% (8.09 m<sup>3</sup>/hr), 12.36% (2.92 m<sup>3</sup>/hari) terproses oleh bank sampah dan 53.35% (12.60 m<sup>3</sup>/hr) sampah domestik diolah disumber. TPA Pola Mata menangani 50.60% (29.59 m<sup>3</sup>/hr), 14.82% (8.70 m<sup>3</sup>/hari) diproses oleh bank sampah, 34.51% (20.18 m<sup>3</sup>/hr) diolah disumber. (Tabel 2.20. Timbulan Sampah Kabupaten dan Tabel 2.22. Cakupan Layanan Persampahan Kabupaten).

Sampah yang terangkut ke TPA berasal dari sampah rumah tangga, perkantoran, taman, pasar, rumah sakit dan lainnya. Alat pengangkutan berupa 2 unit dump truk. Ada sebagian sampah dikumpulkan menggunakan dengan roda tiga dan dibawa ke TPA, sebagian lagi di TPS berupa container yang kemudian diangkut menggunakan armroll menuju TPA Batu Putih. Sarana dan prasarana persampahan yang dimiliki Pemda setempat berupa roda tiga berjumlah 34 unit, container sebanyak 8 unit, armroll sebanyak 2 unit. Prasarana untuk wilayah JMS terdiri dari 2 unit dump truk bantuan PT. NNT, 1 unit dikelola oleh kecamatan dan 1 unit dikelola oleh BUMDes Tongo, 2 unit dikelola oleh Kecamatan Maluk dan BUMDes, 1 unit untuk Kecamatan Jereweh yang dikelola oleh BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa).

*Gambar 2.3 Diagram Sistem Sanitasi Sub Sektor Persampahan di Kabupaten Sumbawa Barat.*



Tabel 2.8 Tabel Timbulan Sampah Kabupaten Sumbawa Barat

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Iiwa)	Timbunan Sampah									
			Sampah Dikelola Mandiri di Sumber		Sampah Terproses 3R		Sampah Terangkut ke TPA		Sampah Tidak Terproses		Total	
			(%)	(m <sup>3</sup> /hari)	(%)	(m <sup>3</sup> /hari)	(%)	(m <sup>3</sup> /hari)	(%)	(m <sup>3</sup> /hari)		
<b>TPA Sekongkang</b>												
1	Sekongkang	9,436	37,35	881	12,36	2,92	34,28	8,09	16,01	3,78	100	23,59
<b>TPA Pola Mata</b>												
1	Jereweh	9,734	20,11	11,76	4,11	2,40	8,77	5,13	8,62	5,04	41,62	24,34
2	Maluk	13,655	4,04	2,36	10,78	6,30	41,83	24,46	1,73	1,01	58,38	34,14
	Total	23,389,00	24,15	14,12	14,89	8,71	50,60	29,59	10,35	6,1	100	58,47
<b>TPA Batu Putih</b>												
1	Taliwang	49,795	9,74	24,1	-	-	36,31	90,00	4,17	10,3	50	124,49
2	Brang Ene	5,951	4,20	10,4	-	-	0	-	1,80	4,5	6	14,88
3	Brang Rea	14,582	8,04	19,9	-	-	3,23	8,00	3,44	8,5	15	36,46

Sumber: Jakstrada Persampahan Kab. Sumbawa Barat, 2018

## **BAB 3**

# **KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN LUMPUR TINJA**

### **3.1 WILAYAH DAN CAKUPAN PELAYANAN**

Pengelolaan air limbah di Kabupaten Sumbawa Barat masih mengandalkan pada sistem setempat (*onsite system*), sehingga pengelolaan lumpur tinja yang baik, menjadi sesuatu yang harus segera dilakukan. Sarana yang disediakan berupa bantuan tangki septik individu, MCK/Toilet Umum, IPAL komunal, tangki septik komunal, IPLT dan truk tinja.

Wilayah pelayanan pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan seluruh Kabupaten Sumbawa Barat yaitu di 8 kecamatan yaitu Kecamatan Sekongkang, Jereweh, Maluk, Taliwang, Brang Ene, Brang Rea, Seteluk, dan Kecamatan Poto Tano.

Selain itu, melalui dana APBN (dana Hibah Air Limbah Setempat), telah dibangun tangki septik individu dan IPAL permukiman/komunal (melalui program Sanimas dan DAK SLBM).

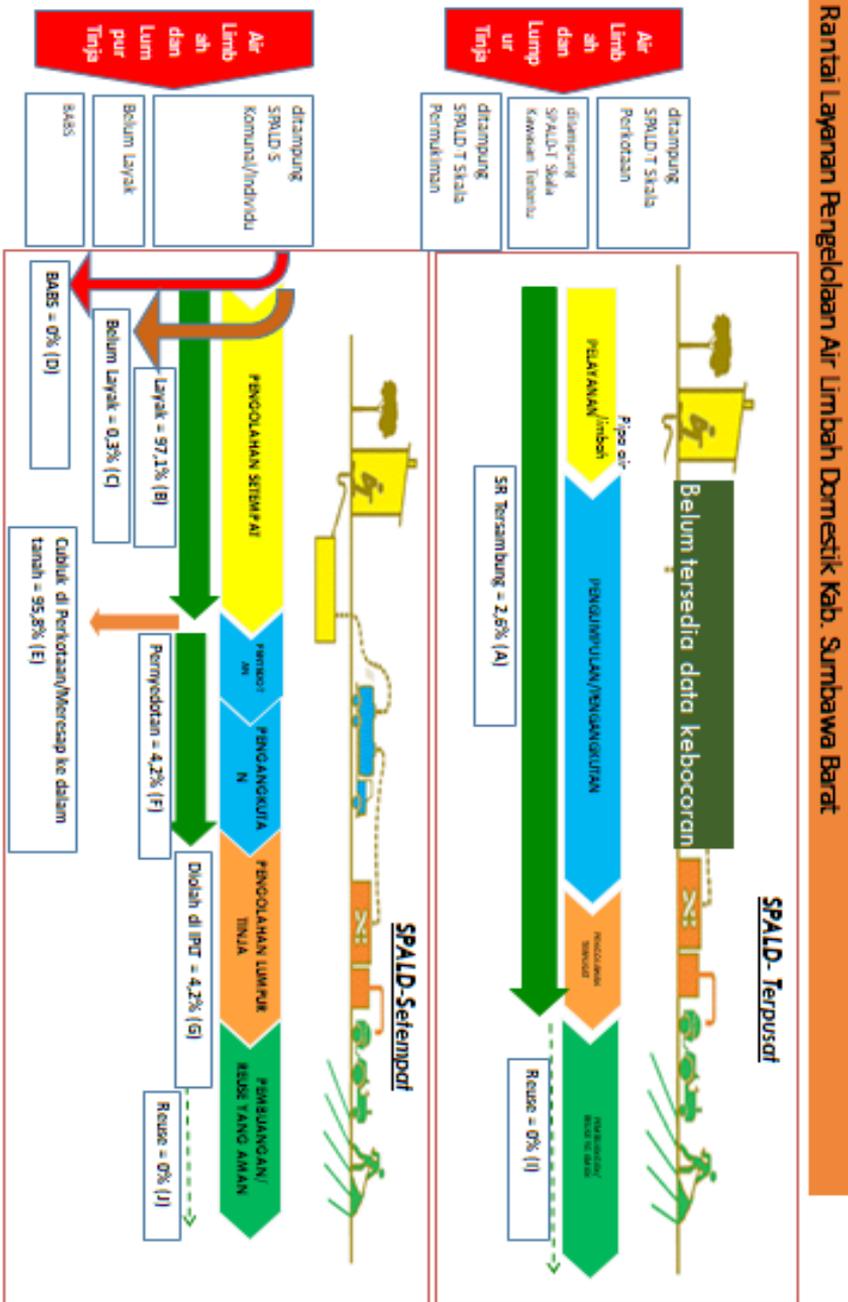
Secara keseluruhan di Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan hasil identifikasi Pokja AMPL Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019 pembuangan tinja dilakukan dengan sistem on-site dengan kepemilikan tangki septik individual layak 92,32% dan tangki septik komunal layak dan aman 3,08%, dan dengan sistem off-site melalui IPAL Permukiman sebesar 4,16%.

Di Kabupaten Sumbawa Barat sudah ada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Gerakan Tuntas Buang Air Besar Sembarangan (TUBABAS). Melalui gerakan tersebut, Kabupaten Sumbawa Barat telah berhasil mendeklarasikan diri sebagai kabupaten pertama di Provinsi NTB sebagai kabupaten ODF pada tahun 2017.

Kondisi sistem pengelolaan air limbah domestic di Kabupaten Sumbawa Barat digambarkan melalui Diagram Sistem Sanitasi (DSS) yang dapat dijelaskan, bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat berbagai tipe dalam penanganan air limbah domestik (khususnya *blackwater*):

1. Dari kloset individu ditampung dengan cubluk (di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk < 25 orang/ha);
2. Dari kloset individu dialirkan ke tangki septik dan di sedot oleh mobil tinja dan dibuang ke IPLT;
3. Dari kloset dialirkan ke tangki septik komunal dan selanjutnya disedot oleh mobil tinja dan dibuang ke IPLT;
4. Dari kloset dialirkan ke sistem IPAL Permukiman atau IPAL komunal.

Gambar 3.1 Diagram Rantai Layanan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sumbawa Barat



Sumber: Laporan Status Sanitasi (LSS) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

### 3.2 ASPEK REGULASI DAN KEBIJAKAN

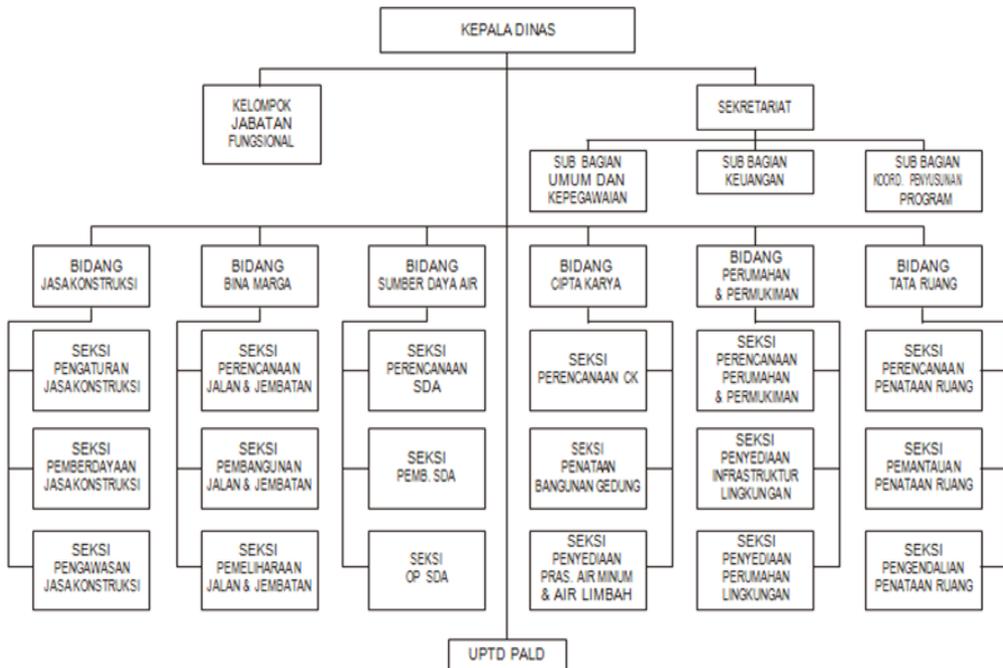
Aspek regulasi merupakan hal penting untuk mengatur pelaksanaan dan pengawasan suatu program. Regulasi terbagi atas regulasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, retribusi, dan pengelolaan air limbah domestik.

Tabel 3.1 Regulasi Terkait di Kabupaten Sumbawa Barat

Regulasi	
Regulasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Air limbah	Belum ada Perda tentang Pengelolaan air limbah domestik (sedang dalam proses penyiapan Draft Final Ranperda untuk diajukan ke DPRD).
Regulasi yang berkaitan dengan retribusi	Belum ada Peraturan Daerah tentang "Retribusi jasa umum" yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik
Regulasi yang berkaitan dengan lingkungan	1. Perda No. 29 tahun 2003 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan 2. Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kab. Sumbawa Barat Tahun 2011-2031.
	3. Perda No. 2 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Air Tanah. 4. Perda No. 9 tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan. 5. Perwal No. 78 tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
Regulasi yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pihak ke 3	Belum ada
Regulasi mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Gerakan Tuntas Buang Air Besar Sembarangan (TUBABAS)
Regulasi OPD Pengelola IPLT	Perbup No. 101 Tahun 2018 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat.

### 3.3 ASPEK KELEMBAGAAN DAN SDM

Saat ini pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah – Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD-PALD) di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (DPUPRPP), Bidang Cipta Karya, sesuai Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik. Sebagai regulator Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (DPUPRPP) bertugas membuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam tata pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana air limbah. Dalam menjalankan fungsi operator, UPTD-PALD Kabupaten Sumbawa Barat didukung sejumlah sumber daya manusia yang khusus mengurus pengelolaan lumpur tinja hanya 6 orang, yaitu 1 orang PNS sebagai Kepala UPTD, 3 PHL honorer operator IPLT, 2 orang PHL pembantu supir, 2 orang PHL tenaga surveyor dan administrasi lapangan dan 1 orang PNS pencatat administrasi/keuangan. Dengan jumlah SDM ini, relatif hanya penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja saja yang dilakukan, sedangkan pemeliharaan area dan unit pengolahan IPLT kurang diperhatikan karena kurangnya jumlah maupun pengetahuan operator sehingga perlu dilakukan penambahan jumlah dan kapasitasnya.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPR PP) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ke-PU-an, Penataan Ruang, perumahan dan kawasan permukiman, yang terdiri dari sub-urusan :

- a. SDA
- b. jalan dan jembatan
- c. air minum;
- d. air limbah; dan
- e. perumahan dan permukiman.

Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (DPUPRPP) Bidang Cipta Karya, dimana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan di Bidang Keciptakarya;
- c. Pengawasan, pengendalian, pemanfaatan drainase ,permukiman bangunan gedung;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya ;
- e. Instansi yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat

Adapun Rincian Tugas Pokok yang dimaksud sebagai berikut :

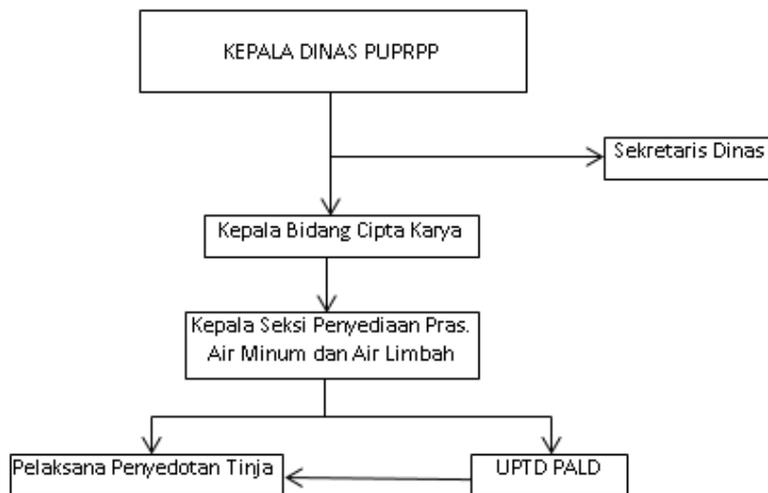
- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan di bidang keciptakarya;
- c. Memberikan pertimbangan teknis mengenai pemberian izin mendirikan bangunan;

- d. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- g. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pada Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat telah memulai operasional UPTD PALD dibawah Bidang Cipta Karya Dinas PUPR PP.

Pelaksanaan pengelolaan IPLT Batu Putih Kabupaten Sumbawa Barat ditangani oleh 4 orang pelaksana yang tugasnya, mengoperasikan Bak SSC (*Solid Separation Chamber*), mengangkat dan memindahkan lumpur yang sudah kering ke *Drying Area*, membersihkan kolam-kolam dari sampah atau benda-benda yang mengapung serta membersihkan seluruh area IPLT.

Pelaksanaan Penyedotan Lumpur Tinja ditangani oleh 2 orang supir dan 4 orang kernet dengan 2 unit truk tinja. Tugas supir adalah melakukan penyedotan dan membawa hasil sedotan ke IPLT Batu Putih.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pelaksana IPLT dan Penyedotan Lumpur Tinja Kabupaten Sumbawa Barat

Implementasi layanan air limbah berupa operasional IPLT dan truk penyedotan tinja yang dilaksanakan oleh UPTD PALD. Masih belum memadainya jumlah maupun kualitas SDM pengelola IPLT dan Penyedotan Lumpur Tinja menjadi isu pengelolaan layanan lumpur tinja dari aspek kelembagaan. Diharapkan dengan beroperasionalnya UPTD PALD akan lebih meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah domestic di Kabupaten Sumbawa Barat di tahun-tahun mendatang.

### 3.4 ASPEK TEKNIS

Teknis dalam pengelolaan lumpur tinja dapat diilustrasikan sebagai berikut:

#### 3.4.1 Pewadahan

yang dimaksud dengan pewadahan adalah bangunan atas atau user interfase atau biasa disebut dengan jamban.

Tabel 3.2 Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Sumbawa Barat

no	Kecamatan	Jumlah penduduk (KK)	System on-Site (KK)		System komunal (KK)	System off site (KK)	BABS (KK)
			Individual layak	Individual belum layak			
1	Sekongkang	2.612	2.432	-	80	100	-
2	Jereweh	2.485	2.245	-	140	100	-
3	Maluk	4.351	4.201	-	100	50	-
4	Taliwang	13.209	12.609	-	150	450	-
5	Brang Ene	1.969	1.649	-	100	220	-
6	Brang Rea	4.032	3.637	-	238	157	-
7	Seteluk	5.618	5.037	-	206	375	-
8	Poto Tano	3.090	2.850	-	139	100	-
Total		37.366	34.661	-	1.153	1.552	-

Sumber: Instrumen Implementasi SSK, 2019

Tabel di atas menunjukkan, bahwa diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, didominasi oleh Penggunaan sistem on-site individual. Berdasarkan data yang ada, sistem on-site dibagi 2 yaitu individual layak 92,75% dan individual belum layak (cubluk) 0%. Sedangkan rata-rata prosentase penduduk yang menggunakan sistem komunal maupun sistem off-site masih sedikit berturut-turut 3,10% dan 4,15%. Secara keseluruhan di Kabupaten Sumbawa Barat telah mencapai akses layak 100%.

Adapun akses masyarakat ke IPALD Permukiman dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Kondisi IPALD Permukiman Kab. Sumbawa Barat

No.	Nama IPAL	Status Aset	Kapasitas IPAL (M3/Hari)	Tahun Pembangunan	Sistem IPAL	Kondisi IPAL
1	Kws Brang	Serah terima	140	2017	Anaerobik-Aerobik	Baik
2	DAK Reguler	Serah terima	90	2018	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
3	DAK Reguler	Serah terima	90	2018	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
4	DAK Reguler	Serah terima	90	2018	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
5	DAK Reguler	Serah terima	90	2018	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
6	DAK Reguler	Serah terima	90	2018	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
7	DAK Afirmasi	Serah terima	90	2016	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik

8	DAK Afirmasi	Serah terima	90	2016	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
9	DAK Afirmasi	Serah terima	90	2016	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
10	DAK Afirmasi	Serah terima	90	2016	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
11	DAK IPD	Serah terima	90	2016	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
12	DAK IPD	Serah terima	90	2016	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
13	DAK IPD	Serah terima	90	2016	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
14	DAK	Serah terima	90	2015	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
15	DAK	Serah terima	90	2014	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
16	DAK	Serah terima	90	2014	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
17	DAK	Serah terima	90	2014	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
18	DAK	Serah terima	90	2014	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik
19	DAK	Serah terima	90	2014	Aerobik Buffled Reaktor (ABR)	Baik

### 3.4.2 Pelayanan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal

Kegiatan penyedotan tangki septik yang dilakukan oleh pengelola IPLT, menggunakan 2 unit truk tinja berkapasitas 3 m<sup>3</sup> dengan kondisi operasional yang cukup baik. Kemampuan maksimal penyedotan pada kondisi datar 30-40 meter. Sedangkan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali pelayanan adalah 1,5 - 2 jam, dimana rata-rata jarak tempuh wilayah pelayanan terhadap IPLT 40 km PP.

Tabel 3.4 Kebutuhan Waktu Pelayanan Penyedotan

No	Keterangan	Waktu
1	Persiapan di Garasi Batu Putih	7.30-7.45
2	Perjalanan menuju pelanggan	7.45-8.20
3	Persiapan penurunan selang, kordinasi dengan pengelola tempat mengenai Lubang penyedotan	8.20-8.30
4	Proses penyedotan $\pm 1 \text{ m}^3$	8.30-8.50
5	Persiapan perjalanan ke IPLT, merapihkan dan membersihkan selang-selang	8.50-9.00
6	Mobilisasi ke IPLT	9.00-9.35
7	Proses Un-loading	9.35-9.45
8	Pembersihan saluran outlet tanki dan selang	9.45-9.50
9	Demobilisasi ke garasi Batu Putih	9.50-10.25
10	Setor retribusi	10.25-10.30
TOTAL WAKTU		180 Menit

Sumber: Observasi, 2020

#### 3.4.2.1 Pelanggan

Prosedur penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilakukan oleh pelanggan melalui permintaan langsung ke kantor Dinas PUPR PP atau melalui telepon kantor dinas dan atau melalui HP petugas penyedotan tinja (supir). Pelanggan hanya menyebutkan nama, alamat rumah, nomor telpon/HP, kapan, tanggal dan jam berapa minta disedot. Selanjutnya seluruh data tersebut dicatat dalam buku besar atau logbook.

Setelah didapatkan data nama, alamat dan waktu penyedotan, maka pihak penerima telepon/petugas atau supir tangki tinja melaporkan kepada bagian tata usaha untuk melaporkan adanya permintaan penyedotan, selanjutnya tata usaha dinas menyiapkan biaya BBM.

Penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal di Kabupaten Sumbawa Barat pada umumnya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sejak 2019. Dari data *logbook* penyedotan tinja dimulai dari bulan Januari sampai bulan November 2020 menunjukkan bahwa penyedotan terbanyak dilakukan di Kecamatan Taliwang, berikutnya Kecamatan Seteluk, kemudian Kecamatan Poto Tano. Berikut ini data penyedotan oleh UPTD PALD Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

Tabel 3.5 Data Penyedotan UPTD PALD Kab. Sumbawa Barat sejak Tahun 2019

Tahun	Bulan		Jenis Pelanggan (Unit)						Jumlah	Vol M3	Jumlah Ritasi Rata2/Hari	Jarak Ke IPLT	Desa/Kel. Kecamatan	
			Rumah Tangga	Kantor	Fasilitas Umum	IPAL Komunal	IPAL Kawasan	IPAL Kombinasi MCK						MCK PLUS
2019	1	Januari	8	-	-	2	-	1	1	12	48	2,18	288	Desa Seteluk Atas kecamatan Seteluk
	2	Februari	1	-	-	2	1	1	1	6	24	1,09	14	Sapugara Bree Kec Brang Rea
	3	Maret	6	2	-	2	-	1	-	11	44	2,00	65	Desa Hijrah Desa Ai Suning Kec Brang Enen Kec Seteluk
	4	April	8	-	-	5	1	-	1	15	60	2,73	59	Kel Menala Kel Bugis Desa Seteluk atas Desa Hijrah
	5	Mei	5	-	-	3	1	1	1	11	44	2,00	26	Kel Bugis Kel Kuang Dalam kec Taliwang
	6	Juni	4	1	-	2	1	1	-	9	36	1,64	18	Kel Dalam Kel Sampir Kec Taliwang
	7	Juli	5	-	-	3	-	-	1	9	36	1,64	43	Desa Tebo Desa Seteluk Asta Kec Poto Tano Kec Seteluk
	8	Agustus	4	-	-	4	1	1	-	10	40	1,82	13	Kel Kuang Kec Taliwang
	9	September	3	1	-	2	-	1	-	7	28	1,27	30	Desa Tebo Kec Poto Tano
	10	Oktober	3	-	-	2	2	-	1	8	32	1,45	29	Kel Sampir Desa Sapugara Bree Kec Taliwang Kec Brang Ene
	11	Nopember	4	-	-	2	1	-	-	7	28	1,27	19	Kel Kuang KTC Kel Arken Kec Taliwang
	12	Desember	3	-	-	2	-	1	1	7	28	1,27	28	Kel Bugis Desa Sapugara Bree Kec Taliwang Kec Brang Rea
2020	1	Januari	8	-	-	2	1	-	-	11	44	2,00	45	Kel Telaga Bertong Kel Arab kenangan Desa mantun Ds Tepas Sepakat Kel MenalaDs Sapugara Bree KecTaliwang Kec Brang Rea Kec Maluk
	2	Februari	5	-	-	2	1	-	-	8	32	1,45	15	Da sapugara Bre ds Tepas Kec Brang Rea
	3	Maret	24	1	-	2	1	-	-	28	112	5,09	20	Kel Kuang Kel Menala Kel Bugis Kel Arken Kec Taliwang
	4	April	6	-	-	2	1	-	-	9	36	1,64	21	Kel Arken Ds Tepas Kel Kuang Kec Brang Rea Kec Taliwang
	5	Mei	2	-	-	2	1	-	-	5	20	0,91	16	Kel Arab Ds Sermong Kec Taliwang
	6	Juni	12	1	-	2	1	-	1	17	68	3,09	38	Kel Menala Kel Arken Ds Sapugara Bree Kel Bertong Kel Kuang Kec Taliwang Kec Brang Rea
	7	Juli	8	-	-	2	1	-	-	11	44	2	48	Kel Telaga Bertong Kel Menala Kel Arab Kenangan Kel Sampir Ds Tamekan Kec Taliwang
	8	Agustus	25	-	-	4	2	-	1	32	128	6	21	Kel kuang Kel Bugis Taliwang
	9	September	16	-	-	2	1	-	1	20	80	3,64	45	Bertong,Bugis,Dalam,Kuang,Lamuntet
	10	Oktober	8	-	-	4	1	-	-	13	52	2,36	30	Tepas,Sapugara,Arken,Telaga bertong,Dalam
	11	Nopember								0	0	0		
	12	Desember								0	0	0		

Tabel 3.6 Kondisi Armada Truk Tinja Kabupaten Sumbawa Barat

No Kendaraan	Daya Hisap Pompa	Panjang Selang	Keadaan Selang	Jenis Penyambungan Selang	Permasalahan yang Sering Terjadi	Pemeliharaan Reguler Yang Biasa Dilakukan
Truk 1	Lemah	30	80%	Karet	Kondisi vakum 60%, waktu penyedotan melebihi batas waktu normal	Maintenance pompa vakum perlu perhatian
Truk 2	Baik	30	80%	Karet	Baik	Normal

Sumber : Observasi, 2020

Selain armada angkut berupa 2(dua) unit truk tinja, UPTD PALD juga mengoperasikan 1(satu) unit motor roda tiga, dimana operasinya difokuskan pada lokasi pelanggan yang tidak terjangkau oleh truk tinja. Namun pengoperasian motor tinja terkendala oleh kondisi jalan akses menuju IPLT yang curam, berbelok dan mendaki yang dapat membahayakan operator motor tinja. Sehingga sementara waktu belum dioperasikan maksimal.

### 3.4.3 Pengolahan Lumpur Tinja

Pengolahan lumpur tinja dilakukan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Batu Putih, Kec. Taliwang. Hingga saat ini UPTD PALD belum melakukan penggunaan kembali (*re-use*) lumpur hasil olahan, mengingat volume lumpur tinja yang diolah belum banyak.

### 3.4.4 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Batu Putih merupakan milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terletak di Kampung Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. IPLT ini mulai dibangun pada tahun 2016 dengan menggunakan sistem SSC (*Solid Separation Chamber*) yang dibangun melalui dana APBN. Lokasi IPLT terletak area berdampingan dengan TPA Batu Putih dengan luas lahan  $\pm 1,5$  Ha. IPLT Batu Putih mulai dioperasikan pada tahun 2019 awal dan hanya melayani/menerima pembuangan lumpur tinja dari septik tank dan IPAL Komunal penduduk Kabupaten Sumbawa Barat.

#### A. Data Dasar IPLT

1	Nama IPLT	:	Batu Putih
2	Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat
3	Kabupaten/Kota	:	Kabupaten Sumbawa Barat
4	Kecamatan	:	Taliwang
5	Kapasitas	:	13 m <sup>3</sup> / hari
8	Tahun Pembangunan	:	2016 / APBN
9	Serah Terima aset	:	Sudah
10	Serah Terima Pengelolaan	:	Sudah

#### Kondisi Fisik Bangunan IPLT

Dalam Pengolahan di IPLT Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari SSC, Kolam Stabilisasi (Kolam Anaerobik, Kolam Fakultatif, Kolam Maturasi, dan *Sludge Drying Area*. Kondisi bangunan pada umumnya baik dan beroperasi dengan optimal. Rincian kondisi fisik untuk masing-masing unit pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Kondisi Bangunan Fisik IPLT Kabupaten Sumbawa Barat

No	Nama Bangunan Peralatan	Jumlah (Unit)	Jenis Konstruksi	Dimensi (m)					Kondisi Fisik Bangunan			Kondisi Operasional		Keterangan dan Uraian	
				Panjang Atas	Panjang Bawah	Lebar Atas	Lebar Bawah	Kedalaman	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Beroperasi	Beroperasi Tidak		Tidak/Belum Beroperasi
1	SSC	4	beton						√			√			Akses pengangkutan sludge menuju Drying Area agak sulit, perlu sarana akses yang lebih mudah dengan gerobak sorong
2	Kolam anaerob	1	beton						√			√			Kolam sudah dikuras menggunakan pompa namun belum maksimal. Tinggi kolam masih optimal ditambah musim penghujan
4	Kolam Fakultatif	1	beton						√			√			Pembersihan permukaan dan ganggang harus rutin dilakukan dan perlu dilakukan pengurusan.
4	Kolam Maturasi	1	beton						√			√			Permukaan terdapat sampah daun dan lain-lain sebaiknya dilakukan pembersihan
5	Sludge Drying Area	1	beton						√			v			Perlu penambahan atap pelindung transparan, sehingga tidak kehujanan, tapi sinar matahari masih bisa masuk

Sumber : Hasil Survei Konsultan, 2018

Tabel 3.8 Kondisi Bangunan Penunjang IPLT Batu Putih Kab. Sumbawa Barat

No	Nama Bangunan	Ketersediaan Bangunan		Kondisi Fisik Bangunan		
		Ada	Tidak ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kantor	√		√		
2	Laboratorium		√			
3	Sarana Air Bersih	√		√		
4	Ketersediaan Listrik dan Gen-set	√		√		
5	Bengkel dan Garasi		√			

Sumber : Hasil Observasi, 2020

### 3.5 ASPEK KEUANGAN

Aspek keuangan eksisting yang dapat digali dari pengelolaan lumpur tinja yang dikelola oleh Dinas PUPR PP Kabupaten Sumbawa Barat masih terfokus pada alokasi anggaran operasional UPTD PALD. Selain itu, regulasi terkait besaran retribusi Penyedotan tinja belum diatur dalam Perda tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga layanan kepada masyarakat sama sekali tidak dikenakan retribusi atau gratis.

Berdasarkan data dari Bidang Cipta Karya Dinas PUPR PP, dimana pengelolaan operasional untuk biaya operasional penyedotan tinja (kendaraan truk tinja dan IPLT) sebagai berikut:

**Tahun 2019: Biaya operasional 2 unit kendaraan truk tinja (BBM dan Pemeliharaan/ Penggantian suku cadang dan Operasional IPLT) sebesar Rp. 93.700.000,-**

**Tahun 2020: Biaya operasional 2 unit kendaraan truk tinja (BBM dan Pemeliharaan/ Penggantian suku cadang dan Operasional IPLT) sebesar Rp. 34.650.000,-**

### 3.6 ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Peran serta masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal pengelolaan air limbah, khususnya lumpur tinja masih berupa potensi yang belum dioptimalkan. Belum pernah dilakukan survey sosek yang dapat mengukur apakah masyarakat sangat partisipatif atau kurang berpartisipasi dan mengetahui atau tidak mengetahui terkait dengan konstruksi tangki septik yang benar dan penyedotan yang bersifat terjadwal. Kemauan dan kemampuan membayar (*willingness to pay and ability to pay*) masyarakat dalam layanan sedot tinja juga belum bisa diukur.

Begitu juga, hingga saat ini belum ada sector swasta terlibat dalam jasa layanan sedot tinja.

## BAB 4

### RENCANA TAHAPAN PENGEMBANGAN LAYANAN LUMPUR TINJA

#### 4.1 RENCANA JENIS LAYANAN LUMPUR TINJA

Berdasarkan data potensi layanan lumpur tinja di Kabupaten Sumbawa Barat, maka layanan lumpur tinja dapat dikategorikan dalam 2(dua) jenis layanan, yaitu:

1. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)

Sasaran L2T2 difokuskan pada penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat sejak tahun 2017 hingga 2019, dengan sebaran penerima manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Sebaran Jumlah Tangki Septik Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2017-2019

NO	KECAMATAN	NO. KEL	DESA / KELURAHAN	TAHUN			
				2017	2018	2019	TOTAL
1	JEREWEH	1	GOA	25	41	164	230
		2	BELO	97	83	30	210
		3	BERU	101	95	75	271
		4	DASAN ANYAR	47	69	85	201
		JUMLAH			270	288	354
2	TALIWANG	1	MENALA	175	134	314	623
		2	KUANG	35	205	288	528
		3	BUGIS	50	239	275	564
		4	DALAM	49	46	189	284
		5	SAMPIR	103	50	133	286
		6	TELAGA BERTONG	221	130	638	989
		7	ARAB KENANGAN	21	59	82	162
		8	LABUHAN LALAR	263	47	17	327
		9	LALAR LIANG	78	62	213	353
		10	LABUHAN KERTASARI	118	144	162	424
		11	SELOTO	65	210	199	474
		12	TAMEKAN	16	77	109	202
		13	BANJAR	78	67	188	333
		14	BATU PUTIH	227	284	162	673
		15	SERMONG	33	28	199	260
JUMLAH			1.532	1.782	3.168	6.482	

3	SETELUK	1	MERARAN	73	64	177	314
		2	AIR SUNING	27	96	191	314
		3	REMPE	63	55	15	133
		4	SETELUK ATAS	60	103	88	251
		5	SETELUK TENGAH	122	213	638	973
		6	KELANIR	149	46	56	251
		7	TAPIR	57	86	75	218
		8	LAMUSUNG	51	28	28	107
		9	SERAN	69	0	68	137
		10	DESA LOKA	60	89	106	255
		JUMLAH			731	780	1.442
4	SEKONG- KANG	1	SEKONGKANG ATAS	13	18	28	59
		2	SEKONGKANG BAWAH	15	2	17	34
		3	TONGO	71	70	39	180
		4	AI KANGKUNG	90	88	80	258
		5	TATAR	95	46	39	180
		6	TALONANG BARU	266	0	22	288
		7	KEMUNING	7	24	21	52
		JUMLAH			557	248	246
5	BRANG REA	1	DESA BERU	19	60	48	127
		2	TEPAS	52	74	240	366
		3	BANGKAT MON- TEH	48	131	0	179
		4	SAPUGARA BREE	170	53	58	281
		5	TEPAS SEPAKAT	85	25	116	226
		6	LAMUNTET	38	14	16	68
		7	RARAK RONGES	122	29	0	151
		8	MOTENG	23	39	0	62
		9	SEMINAR SALIT	151	49	30	230
		JUMLAH			708	474	508
6	POTO TANO	1	SENAYAN	92	247	319	658
		2	MANTAR	188	0	0	188
		3	KIANTAR	90	145	74	309
		4	POTO TANO	186	66	270	522
		5	TAMBAK SARI	30	113	216	359
		6	KOKARLIAN	188	89	23	300
		7	TEBO	39	43	175	257
		8	TUA NANGA	210	60	83	353
		JUMLAH			1.023	763	1.160

7	BRANG ENE	1	MURA	14	35	156	205
		2	KALIMANTONG	43	69	62	174
		3	LAMPOK	14	95	29	138
		4	MANEMENG	33	113	78	224
		5	MUJAHIDIN	74	59	17	150
		6	MATAIYANG	40	0	0	40
		JUMLAH			218	371	342
8	MALUK	1	MALUK	68	105	103	276
		2	BENETE	100	143	142	385
		3	BUKIT DAMAI	49	94	45	188
		4	MANTUN	53	77	85	215
		5	PASIR PUTIH	50	96	405	551
		JUMLAH			320	515	780
JUMLAH TOTAL				5.359	5.221	8.000	18.580

Sumber: Dinas PUPR PP Kab. Sumbawa Barat, 2019

Selain melayani penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat, L2T2 juga mengkomodir masyarakat yang mendaftarkan diri secara sukarela mengikuti program L2T2 yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

## 2. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)

Sasaran L2T3 diperuntukkan bagi masyarakat di luar penerima Program Hibah Air Limbah Setempat dengan target jumlah pelanggan berkisar 6.860 KK hingga tahun 2024 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Layanan L2T3 dilakukan berdasarkan permintaan dari pelanggan (*on call basis*). Guna mendorong peran serta masyarakat dalam pencapaian target sanitasi aman, maka diperlukan kegiatan pendukung dalam bentuk kegiatan sosialisasi, edukasi dan kampanye menuju sanitasi aman kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mengarus-utamakan program sanitasi aman melalui berbagai pendekatan, baik komunikasi/advokasi, pengaturan kelembagaan hingga konsolidasi dan mobilisasi sumber-sumber pendanaan.

## 4.2 RENCANA TARGET & TAHAPAN PENCAPAIAN LAYANAN LUMPUR TINJA

Sesuai dengan target capaian akses sanitasi dalam RPMN 2020-2024, Pemerintah telah menencanakan target akses layanan akhir limbah domestik hingga tahun 2024 sebagai berikut:

1. Angka BABS 0% pada tahun 2024
2. Akses sanitasi/air limbah domestik layak 90% (termasuk didalamnya 15% sanitasi aman)

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan target layanan sanitasi, khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:

Tabel 4.2 Target Pencapaian Layanan Air Limbah Domestik Kab. Sumbawa Barat

No	Uraian	% Kondisi Eksisting (2019)	Target Tahun 2024
1	<b>Akses Sanitasi Layak</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	1.1 Akses Sanitasi Aman		
	- SPALD-S	3,08%	75%
	- SPALD-T	4,16%	10%
	1.2 Akses Sanitasi Layak (Sendiri) – Belum aman	92,76%	30%
	1.3 Akses Sanitasi Layak (Bersama)	0%	0%
2	<b>Tidak Ada Akses</b>		
	- <b>BABS Terselubung</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	- <b>BABS Terbuka</b>		

Secara rinci rencana pentahapan pencapaian target layanan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Rencana Pentahapan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Sumbawa Barat Tahun 2020-2024

No	Komponen	Capaian 2019		Target 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024	
		%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK
	Jumlah Penduduk		37366		38409		39480		40582		41714		42878
1	Akses Aman SPALD-S	3,08%	1151	4%	1536	14%	5614	26%	10527	46%	19149	75%	32340
	L212	0%	0	0%	0	9%	3640	18%	7280	35%	14560	59%	23480
	L213	3,08%	1151	4%	1536	5%	1974	8%	3247	11%	4589	16%	6860
2	Akses Aman SPALD-T	4,16%	1554	5,00%	1920	6,00%	2389	7,00%	2841	8,00%	3337	10%	4288
3	Akses layak SPALD-S	92,76%	34661	91,00%	34952	79,78%	31497	67,06%	27214	46,10%	19228	15%	6432

## 4.3 RENCANA PENGEMBANGAN ASPEK TEKNIS

### 4.3.1 Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan secara umum adalah seluruh wilayah dalam batas administrasi Kabupaten Sumbawa Barat yang akan dilayani dengan pola Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Layanan *on call basis* (L2T3). Katagori CBD adalah wilayah yang merupakan pusat kegiatan Kota yang akan dijadikan wilayah pelayanan prioritas yaitu Kecamatan Taliwang. Berdasarkan kesepakatan Pokja AMPL Kab. Sumbawa Barat, maka untuk wilayah pelayanan prioritas skala terbatas (*pilot project*) dengan skema L2T2 direncanakan dimulai di Kecamatan Taliwang dengan wilayah daftar panjang sebagai berikut:

1. Kelurahan Menala
2. Kelurahan Sampir
3. Kelurahan Dalam
4. Kelurahan Arab Kenangan
5. Kelurahan Kuang
6. Kelurahan Bugis
7. Kelurahan Telaga Bertong
8. Desa Batu Putih
9. Desa Kertasari
10. Desa Labu Lalar
11. Desa Sermong
12. Desa Tamekan
13. Desa Seloto
14. Desa Banjar
15. Desa Lalar Liang

Kecamatan Taliwang dengan jumlah penduduk 52.516 jiwa (13.209 KK) merupakan kecamatan yang telah berkembang menjadi perumahan dan permukiman yang padat.

Tabel 4.4 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kecamatan Taliwang

Kelurahan/Desa	Jumlah KK	TS Layak (KK)	TS tidak Layak / Cubluk (KK)	Komunal (KK)	% BABS
Desa Lalar Liang	426	426	0	0	0
Desa Labuhan Lalar	812	772	0	40	0
Kelurahan Kuang	1.779	1.729	0	0	0
Desa Labuhan Kertasari	517	517	0	0	0
Kelurahan Bugis	1.297	1.247	0	0	0
Kelurahan Dalam	1.081	1.031	0	0	0
Kelurahan Menala	1.651	1.601	0	0	0
Kelurahan Sampir	1.041	991	0	0	0
Desa Seloto	583	503	0	30	0
Desa Tamekan	289	289	0	0	0
Desa Banjar	331	281	0	0	0
Desa Batu Putih	860	820	0	40	0
Desa Telaga Bertong	1.403	1.353	0	0	0
Desa Sermong	286	246	0	40	0
Kelurahan Arab Kenangan	853	803	0	0	0

Sumber: Instrumen SSK, 2019

### 4.3.2 Cakupan Pelayanan dan Database Pelanggan

Calon pelanggan LLTT diklasifikasikan sesuai dengan jenis bangunan dimana tangki septik (TS) digunakan, misal perkantoran, sekolah, rumah tangga, IPAL/Tangki Septik Komunal, niaga, fasilitas umum/sosial. Berdasarkan identifikasi dan diskusi bersama dengan Tim Pokja AMPL Kab. Sumbawa Barat, maka calon pelanggan yang potensial untuk dilayani dalam 4 tahun pertama periode LLTT, pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Calon Pelanggan Potensial dalam Tahap *Pilot Project* L2T2 Kabupaten Sumbawa Barat

No	Kelurahan	Lokasi (Lingkungan/Perumahan)	Jumlah Tangki Septik/TS (unit)
1	Menala		175
2	Kuang		35
3	Bugis		50
4	Dalam		49
5	Sampir		103
6	Telaga Bertong		221
7	Arab Kenangan		21
8	Labuhan Lalar		263
9	Lalar Liang		78
10	Labuhan Kertasari		118
11	Seloto		65
12	Tamekan		16
13	Banjar		78
14	Batu Putih		227
15	Sermong		33
Total			1.532

Keterangan:

Calon pelanggan diambil dari hasil survey/pendataan yang dilakukan oleh Tim Survey UPTD PALD Kab. Sumbawa Barat

### 4.3.3 Pola Penyedotan dan Sistem Pengangkutan

#### 4.3.3.1 Pola Penyedotan

Pola penyedotan berhubungan dengan jenis sarana prasarana untuk menyedot lumpur tinja dari sistem pengolahan setempat, dan berapa banyak volume yang disedot.

Penyedotan bisa dilakukan menggunakan truk tinja dengan kapasitas tangki 3-4 m<sup>3</sup>.

Pada dasarnya, ada 3 pola penyedotan lumpur tinja yang dapat diterapkan dalam LLTT, yaitu :

- Penyedotan keseluruhan, yaitu menyedot semua isi tangki septik, sesuai volumenya. Pola Penyedotan ini tidak disarankan, mengingat variasi volume tangki septik cukup banyak sehingga membutuhkan identifikasi mendetail mengenai volume tangki septik semua pelanggan, dan kerugian dari sisi habisnya lumpur matang yang berfungsi sebagai bakteri “*starter*”, serta ikut tersedotnya pasir/tanah jika tangki septik tidak kedap.
- Penyedotan proporsional, yaitu menyedot sebanyak sekian persen dari volume tangki septik. Misal, jika ditetapkan proporsi penyedotan sebesar 70%, maka tangki septik

dengan volume 2 m<sup>3</sup> akan disedot sebanyak 1,4 m<sup>3</sup>. Pola penyedotan ini membutuhkan data detail mengenai volume tangki septik, ketelitian petugas pelaksana penyedotan dalam memperkirakan prosentase volume tangki septik yang sudah disedot masuk ke tangki truk tinja, kesiapan indikator skala penunjukan volume atau ketinggian lumpur yang ada dalam tangki truk tinja, dan kemungkinan permasalahan non teknis di lapangan.

- Penyedotan Tetap, yaitu menetapkan volume tertentu dalam setiap penyedotan tangki septik. Misalnya berapa pun volume tangki septiknya, hanya 1 m<sup>3</sup> lumpur tinja yang akan disedot. Pola penyedotan ini, adalah pola penyedotan yang direkomendasikan, karena memudahkan pelaksanaan dan memudahkan perhitungan tarif LLTT dan sesuai desain tangki septik individual yang telah dibangun melalui Program Hibah Air Limbah Setempat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipilih Pola Penyedotan Tetap, dengan volume lumpur yang disedot sebanyak 1 m<sup>3</sup> per unit tangki septik untuk semua klasifikasi pelanggan, dengan pertimbangan kapasitas tangki truk tinja 3-4m<sup>3</sup>, sehingga 1 rit dapat melayani penyedotan 2 unit tangki septik.

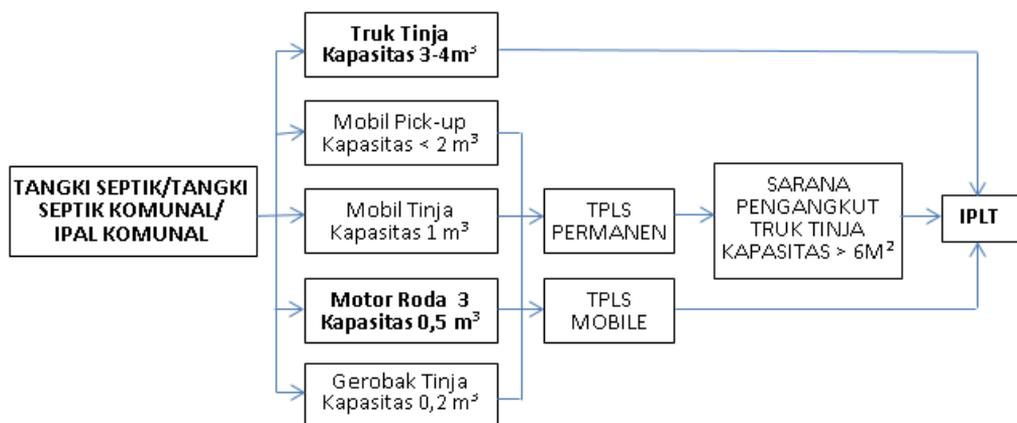
#### 4.3.3.2 Sistem Pengangkutan

Sistem pengangkutan atau transportasi berhubungan dengan cara, rute, jarak dan waktu tempuh membawa lumpur tinja yang sudah berada di dalam armada penyedotan menuju ke tempat pengolahan yang telah ditetapkan yaitu IPLT Batu Putih.

##### (a) Cara Pengangkutan

Dilihat dari cara pengangkutannya saja, maka ada dua cara, yaitu Pengangkutan Langsung, dan Pengangkutan Kolektif.

Gambar 4.1 Alternatif Sistem Pengangkutan



Dengan pertimbangan:

- Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 2 unit Truk Tinja, dan 1 unit Motor Roda 3
- Wilayah Prioritas di Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi seluruh Kecamatan karena memiliki jalan lebar.
- Kabupaten Sumbawa Barat belum mempunyai TPLS Mobile dan TPLS Permanen, dan Gerobak tinja

Maka Sistem pengangkutan yang akan diterapkan di wilayah prioritas dalam siklus pertama ini adalah Sistem Pengangkutan dengan cara Transportasi Langsung, menggunakan armada Truk Tinja dengan kapasitas 3-4 m<sup>3</sup>.

(b) Jarak dan Waktu Tempuh

Jarak dan waktu tempuh dari wilayah pelayanan mulai dari pool kendaraan, lokasi penyedotan, lama waktu penyedotan, waktu tempuh dari TS ke IPLT, waktu buang dan kembali ke pool, dihitung untuk menghitung waktu pelayanan per ritasi, jumlah ritasi harian, dan kebutuhan armada.

Tabel 4.6 Jarak dan waktu Tempuh

No	Sasaran Prioritas	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jarak (km) Waktu Tempuh (menit)	Kondisi Lalin, dan Jalan
1	TS Rumah Tangga	Taliwang	Menala	9 km 17 menit	Jalan Aspal
2	TS Rumah Tangga	Taliwang	Kuang	8 km 15 menit	Jalan Aspal
3	TS Rumah Tangga	Taliwang	Bugis	5 km 15 menit	Jalan Aspal
4	TS Rumah Tangga	Taliwang	Dalam	6 km 16 menit	Jalan Aspal
5	TS Rumah Tangga	Taliwang	Sampir	8 km 17 menit	Jalan Aspal
6	TS Rumah Tangga	Taliwang	Telaga Bertong	9 km 17 menit	Jalan Aspal
7	TS Rumah Tangga	Taliwang	Arab Kenangan	7 km 18 menit	Jalan Aspal
8	TS Rumah Tangga	Taliwang	Labuhan Lalar	12 km 22 menit	Jalan Aspal
9	TS Rumah Tangga	Taliwang	Lalar Liang	13,5 km 25 menit	Jalan Aspal
10	TS Rumah Tangga	Taliwang	Labuhan Kertasari	6 km 15 menit	Jalan Aspal
11	TS Rumah Tangga	Taliwang	Seloto	14 km 25 menit	Jalan Aspal
12	TS Rumah Tangga	Taliwang	Tamekan	10 km 19 menit	Jalan Aspal

13	TS Rumah Tangga	Taliwang	Banjar	6 km 16 menit	Jalan Aspal
14	TS Rumah Tangga	Taliwang	Batu Putih	1 km 6 menit	Jalan Aspal
15	TS Rumah Tangga	Taliwang	Sermong	10 km 19 menit	Jalan Aspal

#### 4.3.4 Periode Penyedotan

Sebagai acuan awal dalam merancang operasional LLTT, maka periode penyedotan dapat ditetapkan antara 2-4 tahun. Periode LLTT yang ditetapkan untuk Kabupaten Sumbawa Barat adalah 3 tahun, mengingat SNI nomor 03-23982002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik, dimana perhitungan desain tangki septik untuk masa penampungan lumpur selama 3 tahun.

#### 4.3.5 Pola Pelayanan

Pola pelayanan dalam operasional LLTT, dimana keberadaan pelanggan sudah terdata, dan telah ditentukan waktu/jadwal penyedotannya oleh pengelola, maka pola pelayanan dapat dibuat dalam bentuk yang lebih efisien waktu, tenaga dan biaya.

Alternatif pola pelayanan pengurusan tangki septik yang saat ini dilakukan oleh pengelola air limbah domestik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat secara sederhana, dimana truk tinja berangkat dari Pool menuju pelanggan untuk melakukan pengurusan, kemudian ke IPLT Batu Putih untuk melakukan pembuangan. Apabila terdapat pelanggan lain yang bisa dilayani dalam 1 ritasi, maka polanya akan menjadi dimulai dari Pool menuju pelanggan 1, lalu menuju pelanggan 2, dan seterusnya (jika memungkinkan, yang disesuaikan dengan kapasitas tangki truk tinja dan volume lumpur yang disedot), kemudian kembali ke IPLT untuk pembuangan.

Program LLTT memungkinkan untuk perubahan pola pengurusan tangki septik menjadi lebih teratur dan efektif. Variable lain yang perlu diperhatikan dalam penentuan pola pelayanan diantaranya adalah waktu tempuh dan jarak tempuh IPLT ke lokasi pelanggan, serta aksesibilitas lokasi pelanggan terhadap armada truk tinja.

#### 4.3.6 Pola Penjadwalan

Pola penjadwalan dalam suatu LLTT adalah algoritma penentuan urutan penyedotan tangki septik dalam suatu rentang waktu tertentu. Pola penjadwalan akan mendasari penentuan pelanggan yang akan mendapat giliran penyedotan tangki septik. Beberapa pola penjadwalan penyedotan tangki septik yang dapat diterapkan adalah:

- Berdasarkan kawasan; Penyedotan dilakukan untuk seluruh tangki septik di satu kawasan dulu sebelum sasaran penyedotan berpindah ke kawasan lain. Untuk efisiensi, satu kawasan penyedotan perlu dibatasi untuk setingkat satu kelurahan. Sebagai contoh, penyedotan tangki septik dijadwalkan untuk Kelurahan Taliwang (bulan 1), Kelurahan B (bulan 2), Kelurahan C (bulan 3) dan seterusnya.
- Berdasarkan klasifikasi pelanggan; Penyedotan dilakukan untuk tangki-tangkiseptik di bangunan-bangunan milik pelanggan dengan klasifikasi tertentu sebelum beralih ke bangunan-bangunan dengan klasifikasi lainnya. Sebagai contoh, penyedotan tangki septik dijadwalkan untuk pelanggan institusi (semester 1), pelanggan niaga (semester 2), pelanggan rumah tangga (semester 3 & semester 4), pelanggan sosial (semester 4).

- c. Berdasarkan jarak radius; Penyedotan dilakukan untuk seluruh tangki septik yang terletak di dalam radius jarak tertentu dari IPLT sebelum sasaran penyedotan berpindah ke radius selanjutnya. Sebagai contoh, penyedotan tangki septik dijadwalkan untuk pelanggan yang berada di dalam radius 0 KM - 3 KM (semester 1), radius 3 KM - 4 KM (semester 2), radius 4 KM-5 KM (semester 3) dan seterusnya.

Lembaga Layanan LLTT (UPTD PALD) dapat menggabungkan dua atau tiga pola tersebut guna menciptakan pola penjadwalan yang lebih efisien dan sesuai dengan kemampuan lembaga tersebut. Misalnya, menggabungkan pola penjadwalan berdasarkan kawasan dengan klasifikasi pelanggan.

Dalam operasi LLTT yang sesungguhnya, selain mengikuti pola penjadwalan yang sudah disepakati, ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bangunan mana yang akan memperoleh layanan penyedotan. Beberapa faktor tersebut adalah a) status keberlangganan, khususnya terkait keaktifan pelanggan dalam membayar rekening layanan, b) kondisi tangki septik, khususnya terkait layak-tidaknya kondisi tangki septik pelanggan untuk menjalani penyedotan dan c) layanan terakhir, atau waktu terakhir tangki septik pelanggan menjalani penyedotan.

Pola penjadwalan didasarkan pada klasifikasi pelanggan dan wilayah administrasi. Saat ini UPTD PALD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagai penanggung jawab pengelolaan lumpur tinja melakukan penjadwalan berdasarkan data pelanggan yang merupakan penerima bantuan Program Hibah Air Limbah Se-tempat, yang umur tangki septiknya telah > 3 tahun belum pernah disedot.

#### 4.3.7 Rancangan Operasional

Simulasi operasi LLTT bertujuan untuk mendapatkan estimasi beban operasi LLTT berikut kebutuhan infrastrukturnya yang sesuai dengan jumlah pelanggan dan target layanan di tiap siklus operasi LLTT. Sebelum melakukan simulasi operasi tersebut, ada beberapa parameter operasi yang perlu diketahui nilainya, seperti a) rasio penghuni bangunan, b) proporsi jenis bangunan, c) tingkat penggunaan tangki septik dan d) volume tangki septik rata-rata.

Untuk nilai di parameter siklus awal, kita dapat menggunakan estimasi jumlah pelanggan sesuai hasil survei calon pelanggan. Sedangkan untuk siklus-siklus selanjutnya, estimasi jumlah pelanggan akan didasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk dan target layanan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Setelah menentukan rentang waktu simulasi operasi, misalnya tahun 2021 – tahun 2024 atau siklus 1 - siklus 4, kita perlu melakukan perhitungan proyeksi penduduk dan jumlah bangunan di tiap siklus operasi.

Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut:

- Hitung potensi jumlah pelanggan sesuai klasifikasinya. Formulasinya adalah:  
jumlah potensi pelanggan =  
(jumlah bangunan) (tingkat penggunaan tangki septik) (proporsi tangki layak-sedot)
- Hitung jumlah pelanggan sesuai klasifikasinya. Gunakan angka target layanan yang disepakati dan asumsi tingkat kepatuhan 8 untuk tiap klasifikasi pelanggan. Formulasinya adalah:  
jumlah pelanggan = (jumlah potensi pelanggan) x (target layanan) x (tingkat kepatuhan)

- Hitung jumlah pelanggan dilayani per hari. Gunakan jumlah hari kerja serta periode penyedotan lumpur tinja untuk membagi jumlah pelanggan. Formulasinya adalah:  
jumlah pelanggan dilayani per hari =
- Hitung beban layanan volume lumpur tinja (yang nantinya akan membutuhkan pengolahan lumpur tinja). Gunakan jumlah pelanggan dilayani per hari dan volume rata-rata penyedotan lumpur tinja. Formulasinya adalah:  
beban layanan volume lumpur tinja =  
(jumlah pelanggan dilayani per hari) x (volume penyedotan tangki septik)
- Hitung frekuensi transportasi lumpur tinja. Gunakan beban pengolahan lumpur tinja per hari dan volume tangki truk sedot tinja. Formulasinya adalah:  
frekuensi transportasi =
- Hitung jumlah unit sedot tinja. Gunakan frekuensi transportasi per hari dan jumlah ritasi maksimal truk tinja. Formulasinya adalah:  
Jumlah unit sedot tinja =

Tabel 4.7 Ringkasan Simulasi Operasional LLTT Kabupaten Sumbawa Barat

No	Uraian	Kabupaten Sumbawa Barat
1	Kapasitas IPLT (m <sup>3</sup> /hari)	13
2	Jarak IPLT ke daerah pelayanan (km)	20
3	Waktu tempuh rata-rata pp (menit/rit)	150
4	Jumlah Jiwa / RT	4
5	Jumlah truk (unit)	2
6	Kapasitas tangki (m <sup>3</sup> )	3
7	Jam Kerja (jam/hari)	7
8	Volume LT di TS (m <sup>3</sup> /RT)	1
9	Ritasi terbentuk (rit)	2
10	Volume LT di kurus (m <sup>3</sup> /hari/unit)	4
11	Total Volume LT di Kurus (m <sup>3</sup> /hari)	8
12	Kebutuhan Truk Tinja (unit)	3

#### 4.3.8 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

IPLT merupakan hilir dari proses perjalanan lumpur tinja yang disedot dari tangki septik. Lumpur tinja akan diolah menjadi lumpur kering dan air olahan atau efluen dari IPLT sudah aman dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu. Oleh karena itu program LLTT harus memperhatikan kondisi IPLT, yang dinyatakan melalui pemeriksaan air limbah di setiap unit pengolahan IPLT Batu Putih Kabupaten Sumbawa Barat, pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Form Analisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Pengolahan di IPLT

Parameter	Satuan	Baku Mutu Permer LH no. 68 th. 2016)	Titik 1	Titik 2	Titik 3	Titik 4	Metode Pemeriksaan	Efisiensi Pengolah		
			Bak SSC	Outlet Kolam Anaerob	Outlet Kolam Fakultatif	Outlet Kolam Maturasi		Kolam Anaerob (%)	Kolam Fakultatif (%)	Kolam Maturasi (%)
TSS	mg/l	30					SNI 06-6889.3-2014			
BOD	mg/l	30					SNI 6989.72:2009			
COD	mg/l	100					SNI 6989.2:2003			
Minyak Lemak	mg/l	5					SNI 6989.10.2011			
Ammonia	mg/l	10					SNI 06 6089.30-2005			
pH	mg/l	6-9					Kertas lakmus			
Total Coliform	MPN /100 ml	3000					APHA 9221			
Analisa										
Catatan Hasil Pemeriksaan:										

#### 4.3.8.2 Permasalahan dan Rekomendasi IPLT

##### Rekomendasi Operasional & Kebutuhan Rehabilitasi IPLT Batu Putih

###### **Kolam SSC:**

1. Penerapan SOP pembuangan ke Kolam SSC belum dijalankan secara berurut dan dalam waktu pengisian.
2. Dari kolam SSC tidak difasilitasi dengan jalan akses pengerukan yang mudah (dengan gerobak dorong), sehingga menyulitkan pekerja IPLT dalam memindahkan *cake* lumpur tinja ke area pengeringan (*Drying Area*)

###### **Kolam Anaerobik, Kolam Fakultatif dan Kolam Maturasi:**

1. Pemeliharaan Rutin belum dilakukan secara optimal, masih dijumpai sampah masuk dalam kolam dan ditumbuhi rumput sekitar kolam yang mulai menjulur ke dalam kolam
2. Ketinggian muka air di *outlet* masing-masing kolam belum dijaga, sehingga sistem pengaliran tidak kontinyu, dimana lumut tumbuh di permukaan kolam.

###### **Drying Area:**

1. Tidak dilindungi dengan atap transparan, sehingga memungkinkan *cake* lumpur tinja akan kehujanan jika musim hujan datang, sehingga memperlama proses pengeringan
2. Tidak dilengkapi fasilitas penampung lumpur hasil olahan yang sudah dikeringkan

###### **Rekomendasi:**

1. Perlu penguatan kapasitas pengelola dalam penerapan SOP pembuangan di IPLT
2. Perlu dibuat fasilitas/jalan akses gerobak dorong untuk memudahkan pekerja IPLT memindahkan *cake* lumpur tinja dari Kolam SSC ke Drying Area.
3. Kolam anaerobik, fakultatif dan maturasi perlu selalu dilakukan perawatan terutama lemak/minyak, sampah dan lumut/tanaman liar yang mengambang di permukaan kolam harus diambil/dibersihkan, lakukan pengurasan lumpur secara periodik ke SDB dan setelah dilakukan pengurasan lumpur, muka air di kolam harus selalu tetap pada level invert pipa outlet. Sekeliling kolam harus diberi pagar dan diberi nama.
4. Kotoran dan ganggang hijau yang ada di kolam fakultatif selalu dibersihkan dan

pertumbuhan ganggang terkontrol, sementara di kolam maturasi semua kotoran dan ganggang harus dibersihkan.

5. Pembangunan atap transparan pada Unit Drying Bed, sehingga area aman dari hujan tetapi sinar matahari masih bisa masuk.
6. Penambahan 1 unit penampungan lumpur olahan sebagai fasilitas pengolahan dan pemanfaatan kembali lumpur yang sudah kering di Drying Area.
7. Perbaikan saluran drainase pada sekeliling bak Drying Area.

#### **4.3.9 Standar Operasional dan Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Konsistensi dalam melaksanakan SOP menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan pelayanan dan harus dilakukan oleh siapa pun yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan kata lain, SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi dari tingkat paling rendah sampai tertinggi. Setiap kegiatan yang dilakukan, harus sesuai dengan SOP karena SOP ini bersifat mengikat pelaksana dalam melakukan tugasnya. Hal-hal yang telah diatur pelaksanaannya dalam SOP ini bukan hal yang tidak boleh diubah, namun membutuhkan perbaikan berkelanjutan untuk menyempurnakan prosedur kerja yang lebih baik.

Dalam Dokumen DED IPLT Batu Putih, telah dilengkapi SOP yang telah disusun antara lain:

- a. Pendataan pelanggan.
- b. Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja
- c. Pembuangan Lumpur Tinja di IPLT
- d. Pemeliharaan IPLT

### **4.4 RENCANA PENGEMBANGAN ASPEK KELEMBAGAAN & SDM**

#### **4.4.1 Isu Strategis**

Isu strategis yang berkembang menyangkut aspek kelembagaan pengelola air limbah domestik di Kab. Sumbawa Barat saat ini adalah :

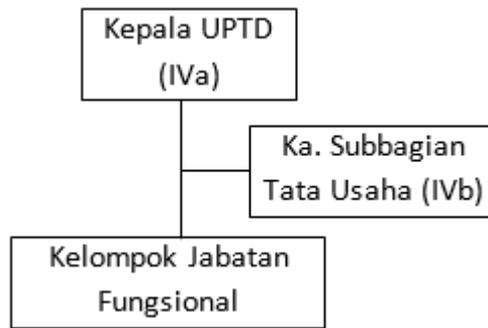
- UPTD PALD Kabupaten Sumbawa Barat telah terbentuk.
- Pengelola air limbah domestik terkait dengan urusan beberapa pemangku kepentingan, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (DPUPR PP) dan Dinas Kesehatan, terlihat adanya sinergi program kegiatan diantara pemangku kepentingan terkait, namun masih perlu upaya sinergitas lebih konkrit dalam implementasi LLTT.
- Pengelolaan lumpur tinja saat ini dikelola oleh Dinas PUPR PP, yang di dalam tupoksi-nya sudah mencantumkan urusan air limbah namun alokasi anggaran belum mengakomodir rencana implementasi program LLTT secara masif.
- Kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Air Limbah Domestik masih perlu ditingkatkan.

#### **4.4.2 Kajian dan Rekomendasi**

Klasifikasi UPTD

Penentuan klasifikasi, ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:

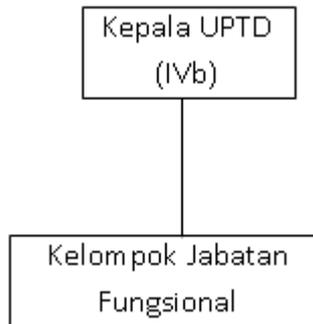
- a. UPTD kabupaten/kota Kelas A dibentuk apabila:
  1. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kecamatan; dan
  2. jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.



Gambar 4.2 Tipikal Struktur Organisasi UPTD Tipe A

b. UPTD kabupaten/kota Kelas B dibentuk apabila:

1. lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) Kecamatan; dan
2. jumlah beban kerja antara 5000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.



Gambar 4.3 Tipikal Struktur Organisasi UPTD Tipe B

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, saat ini UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Kabupaten Sumbawa Barat yang telah dibentuk memiliki wilayah kerja seluruh Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri atas 8 Kecamatan, dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan berkisar 139.437 jiwa, maka klasifikasi UPTD adalah Tipe A.

SDM Pengelola IPLT yang ada baru 12 orang, sehingga memungkinkan kegiatan operasional di IPLT berjalan tidak optimal. Untuk idealnya maka rekrutmen SDM sesuai dengan struktur organisasi UPT PALD yang akan direncanakan.

Usulan SDM yang ideal jika dilakukan rekrutmen untuk menunjang pengelola air limbah adalah sebagai berikut:

Kepala UPT PALD	: 1 orang
Kasubag TU	: 1 orang
Bendahara	: 1 orang
Staf Administrasi	: 1 orang
Koordinator IPLT	: 1 orang
Koordinator Penyedotan	: 1 orang
Koordinator Promosi dan Pendataan	: 1 orang

Operator IPLT	: 4 orang
Teknisi Kendaraan	: 1 orang
Pembantu Keamanan	: 2 orang
Supir Truk Tinja	: 2 orang (sesuai jumlah truk)
Pembantu Supir Truk Tinja	: 4 orang (2x jumlah truk tinja)
Tenaga promosi dan Pendataan	: 2 orang
Teknisi & Operator Appl GO PINKI	: 1 orang
Total	: 23 orang

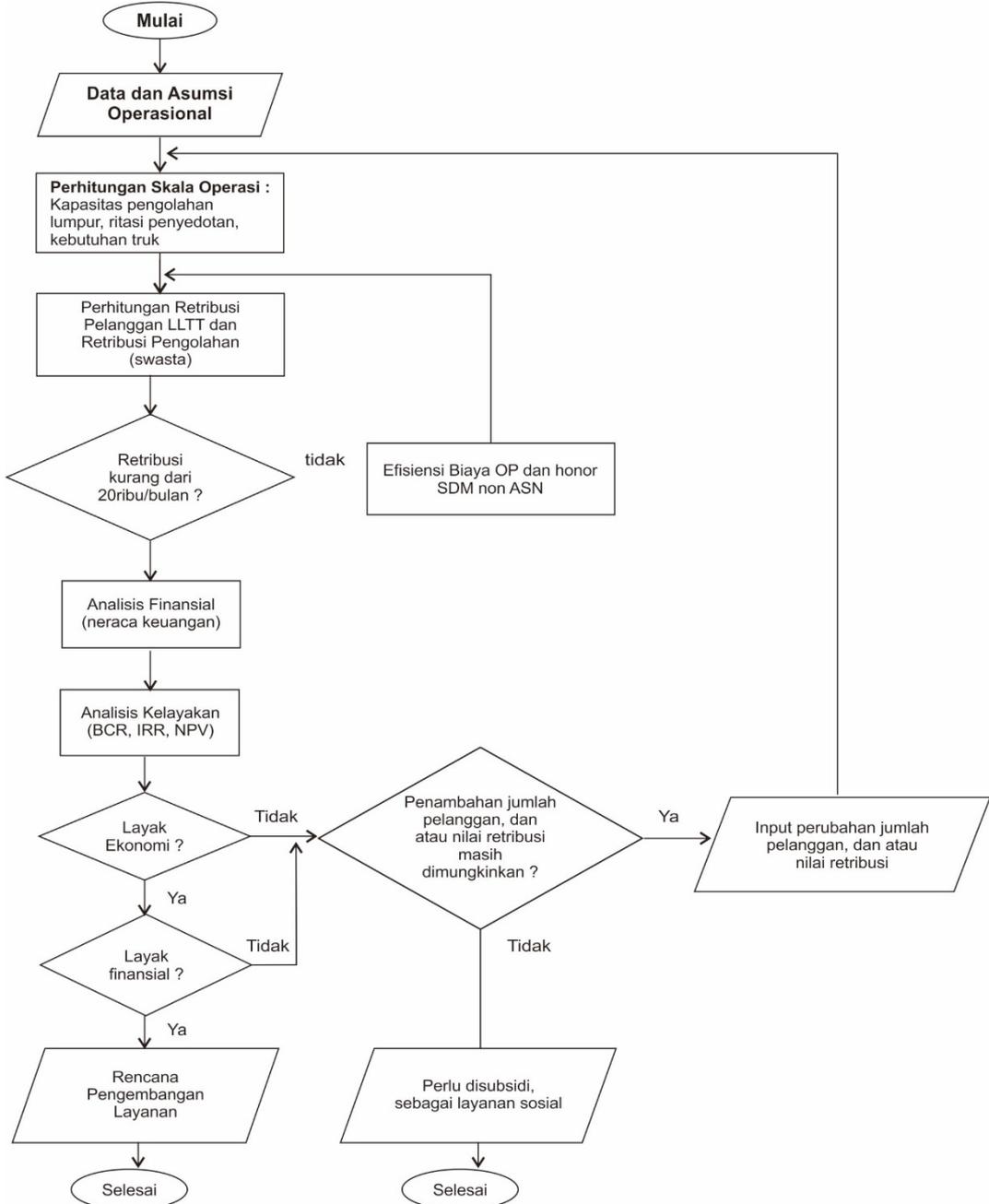
Rencana tindak lanjut yang diharapkan dapat dilakukan dalam jangka waktu dekat adalah adanya penguatan kelembagaan dalam memaksimalkan SDM sesuai peruntukannya sebagai pengelola IPLT dan penyedotan lumpur tinja serta menutup *gap*/kekurangan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kapasitasnya.

Skema pengembangan SDM disesuaikan dengan kebutuhan layanan, dimana saat ini dengan jumlah IPLT sebanyak 1 unit dan jumlah truk tinja sebanyak 2 unit, maka jumlah SDM tersebut memadai hingga 2 tahun ke depan. Namun seiring dengan peningkatan target layanan, maka kuantitas SDM juga harus ditingkatkan.

## 4.5 RENCANA PENGEMBANGAN ASPEK REGULASI

### 4.5.1 Isu Strategis

- Belum terbentuk Perda yang mengatur tatacara Pengelolaan Air Limbah Domestik serta Retribusi penyedotan tinja.
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat masih menggratiskan layanan setiap permintaan warga untuk penyedotan lumpur tinja.
- Belum ada regulasi yang mewajibkan kepemilikan tangki septik yang kedap bagi



Gambar 4.4 Alur Pikir Kajian Finansial

#### 4.6.1 Perhitungan Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari Pemerintah Daerah kepada perseorangan maupun badan. Perhitungan retribusi atas jasa pelayanan dalam LLTT menyangkut pungutan biaya atas jasa penyedotan kepada pelanggan dalam siklus 3 tahunan artinya pelanggan membayar retribusi atas jasa pelayanan penyedotan sekali dalam 3 tahun yang dibayarkan perbulan per M3. Selanjutnya karena retribusi dikenakan kepada pelanggan dalam satuan MB dan dikenakan perbulan, maka disebut retribusi.

Jadi, retribusi mengacu kepada pungutan dari daerah yang dikenakan hanya kepada pihak yang diberikan jasa tertentu atau izin khusus untuk mengelola kekayaan daerah.

Karakteristik retribusi yang perlu kita ketahui adalah:

- Pertama adalah, pungutan retribusi telah diatur di dalam peraturan-peraturan daerah yang berlaku secara umum
- Kedua, uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum yang berkaitan dengan jenis retribusi yang berkaitan.
- Ketiga, pelayanan retribusi dapat dipaksakan kepada beberapa pihak dan biasanya sifat retribusi ekonomis (tidak memberatkan).
- Keempat, ada sanksi ekonomis yang dapat dibebankan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi dari izin atau jasa tertentu yang dipakai.

Jenis-Jenis Retribusi:

Retribusi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Retribusi Jasa Umum yakni retribusi yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa umum tertentu yang disediakan oleh daerah. Jenis retribusi ini meliputi Retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, biaya cetak KTP, Pelayanan Pasar, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pemakaman kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengendalian menara telekomunikasi, pelayanan pendidikan, pengolahan limbah cair, penyedotan kakus, dan penggantian biaya cetak peta. Prinsip dari penetapan sasaran tariff diambil berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan kemampuan masyarakatnya.
- Retribusi Jasa Usaha yaitu jenis retribusi yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa tertentu yang disediakan daerah untuk melakukan usaha dan memperoleh keuntungan. Contohnya yakni pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir, tempat pelelangan, terminal, tempat penginapan, tempat rekreasi dan olahraga, penjualan produksi usaha daerah, pelayanan kepelabuhanan, penyebrangan di air, dan retribusi rumah potong hewan. Berbeda dengan retribusi jasa umum, prinsip dari jenis retribusi jasa usaha mengacu kepada keuntungan yang diperoleh dari keuntungan perorangan atau badan penerima izin yang berorientasi kepada harga pasar.
- Retribusi Perizinan yang dikenakan kepada pihak atau badan tertentu yang atas izin tertentu dari pemerintah daerah misalnya saja Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Trayek, dan Izin usaha Perikanan. Jenis retribusi ini memiliki prinsip yang berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian bahkan seluruh biaya pelaksanaan pembeian izin.

#### 4.6.2 Komponen Biaya Perhitungan Retribusi

Untuk memperhitungkan biaya retribusi, maka harus dihitung biaya produksi (production cost) dari suatu produk yang dihasilkan. Biaya Produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan/ badan usaha dalam proses produksi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu barang atau produk yang siap dipasarkan. Biaya produksi juga dapat diartikan sebagai akumulasi biaya yang diperlukan dalam proses produksi, mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa production cost adalah ongkos produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan/badan usaha untuk menghasilkan suatu barang jadi hingga barang tersebut masuk ke dalam pasar untuk dijual.

Biaya produksi dalam pengelolaan LLTT adalah akumulasi biaya yang diperlukan dalam proses operasional pengelolaan LLTT yang mencakup biaya personil langsung, biaya tetap operasional, biaya tidak tetap operasional dan biaya pengolahan lumpur tinja di IPLT. Komponen biaya di dalam perhitungan retribusi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk seluruh pengelolaan IPLT (penyedotan dan pengolahan) berupa:

1. Biaya Tetap (fixed cost), yang terdiri dari:
  - a. Gaji personil pengelola IPLT,
  - b. Biaya operasional kendaraan, terdiri atas biaya operasional rutin penyedotan (biaya operasional truk tinja : bahan bakar, pelumas, ban, biaya mekanik, suku cadang), penggantian dan konsumsi oli pompa vakum.
  - c. Pajak Kendaraan
  - d. Cetak plat nomor
  - e. Asuransi (BPJS)
2. Biaya Tidak Tetap (variabel cost), yang terdiri dari :
  - a. Biaya untuk pompa penyedot (biaya bahan bakar, olie pompa, suku cadang)
  - b. Biaya toll
  - c. Uang makan dan pulsa
  - d. Biaya listrik
  - e. Biaya pemeliharaan rutin IPLT
  - f. Biaya Laboratorium
  - g. Biaya K3
  - h. Biaya penyusutan

#### **4.6.2.1 Perhitungan Skala Operasi**

Semua komponen biaya tersebut di atas dipengaruhi oleh data, asumsi dan perhitungan skala operasi, yang meliputi :

- Jumlah penduduk
- Jumlah tangki septik
- Prosentase tangki septik suspen aman
- Prosentase tangki septik yang bisa disedot
- Kapasitas IPLT dan kapasitas lumpur yang diolah
- Radius IPLT dari wilayah pelayanan, dan waktu tempuhnya
- Pola penyedotan (periode penyedotan terjadwal)
- Pola pengangkutan
- Kendaraan pengangkut (kapasitas, dan jumlah ritasi per hari)
- Asumsi jumlah hari kerja per tahun, jumlah jam kerja efektif per hari
- Kebutuhan armada

#### **4.4.4 Kebutuhan Biaya Investasi dan Operasional Layanan Lumpur Tinja**

Kajian financial dilakukan untuk memperhitungkan kebutuhan pendanaan dalam layanan lumpur tinja di Kabupaten Sumbawa Barat sesuai target capaian hingga tahun 2024. Adapun aspek financial yang diperhitungkan meliputi:

- a. Kebutuhan investasi hingga tahun 2024
- b. Kebutuhan Operasional dan Pemeliharaan Layanan lumpur tinja hingga tahun 2024

Sesuai target capaian sanitasi layak dan aman hingga tahun 2024, maka dalam perencanaan ini telah dihitung kebutuhan infrastruktur hingga 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Analisa kebutuhan Infrastruktur hingga tahun 2024

No	Komponen	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Kebutuhan Infrastruktur</b>					
1	Tangki Septik*	385	4078	4913	8622	13192
2	<b>Armada Sedot Tinja</b>					
	Alternatif 1: Truk Tinja	0	1	1	1	1
	Alternatif 2: Truk Tinja	0	1	1	1	1
	Alternatif 2: Motor Tinja/Kedoteng	0	1	0	0	1
3	IPLT***	0	1	0	1	0

Sehingga berdasarkan kebutuhan infrastruktur tersebut, maka diperlukan pendanaan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur Layanan Lumpur hingga 2024

No	Komponen	Jumlah Biaya (Rp 000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Kebutuhan Infrastruktur</b>					
1	Tangki Septik*	0	14.273.500	17.195.000	30.177.000	46.172.000
2	<b>Armada Sedot Tinja **)</b>					
	Alternatif 1: Truk Tinja	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Alternatif 2: Truk Tinja	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Alternatif 2: Motor Tinja/Kedoteng	0	70.000	0	0	70.000
3	IPLT***	0	6.000.000	0	6.000.000	0

\*) Penambahan kebutuhan jumlah tangki septic karena pertumbuhan penduduk

\*\*\*) Dipilih alternative 1 jika semua tangki septic bisa dijangkau truk tinja, dan alternative 2 jika ada wilayah tangki septic tidak terjangkau truk tinja

\*\*\*) Kebutuhan IPLT dengan kapasitas yang sama dengan IPLT eksisting

Adapun kebutuhan Biaya Operasional Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) hingga 2024 terbagi atas 3(tiga) komponen biaya yang meliputi:

- a. Biaya Operasional Penyedotan
- b. Biaya Operasional IPLT
- c. Biaya Operasional Pengembangan Aplikasi GO Pinki

A. Biaya Operasional Penyedotan

Berdasarkan target capaian layanan lumpur tinja hingga 2024, maka analisa kebutuhan Biaya Operasional Penyedotan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Analisa Kebutuhan Biaya Operasional Penyedotan L2T2

Uraian	Jumlah Harga (Rp 000)			
	2021	2022	2023	2024
BIAYA OPERASIONAL PENYEDOTAN	360.935,44	613.455,08	929.422,72	1.308.838,36

B. Biaya Operasional IPLT

Sedangkan kebutuhan Biaya Operasional IPLT hingga 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.12 Analisa Kebutuhan Biaya Operasional IPLT

Uraian	Jumlah Harga (Rp 000)			
	2021	2022	2023	2024
BIAYA OPERASIONAL IPLT	184.534,58	184.534,58	366.297,15	548.059,73

C. Biaya Operasional Pengembangan Aplikasi Go Pinki

Dalam rangka menunjang operasionalisasi layanan lumpur tinja yang bisa menjangkau wilayah layanan yang lebih luas serta kecepatan layanan yang efektif, maka UPTD PALD akan mengembangkan aplikasi Go Pinki yang akan mendukung proses pendataan pelanggan, layanan *online* dan *data storage*. Pada tahun pertama (2021) diperlukan biaya investasi dan operasional, sedangkan tahun berikutnya cukup dengan biaya operasional. Adapun analisa kebutuhan biaya pengembangan Aplikasi Go Pinki adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Analisa Kebutuhan Biaya Operasional Pengembangan Aplikasi Go Pinki

Uraian	Jumlah Harga (Rp 000)			
	2021	2022	2023	2024
BIAYA INVESTASI DAN OPERASIONAL GO PINKI	53.500	19.800	39.600	39.600

#### 4.4.3 Model Bisnis IPLT

Dalam dunia bisnis, banyak hal yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Antara lain mengenai kemampuan melihat peluang, kemampuan untuk menghadapi resiko, mengetahui bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan kendala / masalah dalam bisnis, serta bagaimana cara agar mampu menciptakan inovasi baru untuk menyelesaikan permasalahan konsumen. Untuk memulai usaha, modal awal untuk memulai usaha memang merupakan hal utama yang harus dipikirkan. Namun selain itu, tentu masih banyak hal lain yang tidak dapat terlepas dari bagian memiliki usaha.

Tujuan utama memiliki bisnis tentu untuk mendapatkan keuntungan. Namun untuk mencapainya, tidak harus menggunakan cara yang salah demi memenuhi target keuntungan perusahaan. Banyak pelaku bisnis yang menerapkan prinsip mengutamakan kualitas produk maupun pelayanan kepada konsumen dengan baik sehingga mendapatkan profit bisnis yang diharapkan. Untuk mendapatkan keuntungan, tentu setidaknya jenis usaha tersebut tidak mengalami kerugian atau paling tidak minimal balik modal.

Sebelum menjalankan bisnis, memang diperlukan business plan yang baik, terutama strategi dalam menjalankan usaha, serta menghadapi resiko untuk meningkatkan skala perusahaan menjadi cakupan yang lebih besar (scale up). Untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang diharapkan, pelaku bisnis tentu sudah mengetahui bagaimana cara untuk mencapainya berdasarkan business plan yang telah dibuat sebelumnya. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memperhitungkan mengenai biaya produksi. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa biaya produksi adalah hal yang sepele sehingga menganggap remeh dan tidak menyertakannya dalam perhitungan untung rugi sebuah usaha. Namun sebaliknya, biaya produksi sangat penting dalam dunia bisnis. Perlu perhitungan yang tepat dan kalkulasi yang akurat ditambah dengan perhitungan biaya produksi demi tercapainya keuntungan bisnis yang diharapkan.

## Rencana Bisnis

Rencana bisnis atau business plan adalah pernyataan formal dan tertulis mengenai tujuan-tujuan dari sebuah bisnis dan cara mencapai tujuan tersebut. Kenyataannya banyak orang gagal membuat sebuah rencana bisnis disaat akan melakukan bisnis. Beberapa orang meyakini yang penting dari sebuah bisnis adalah jalankan saja.

Pendapat tersebut di atas bahwa ketika berbisnis salah satu hal yang penting adalah jalankan atau *just do it*. Tetapi jalan tanpa rencana adalah perbuatan yang kurang bijak. Apakah dengan membuat rencana bisnis atau *business plan* dapat menggaransi bisnis akan sukses? Tentu saja tidak ada kepastian. Tetapi upaya penyiapan rencana bisnis merupakan upaya dalam menjaga keberlanjutan layanan.

Rencana bisnis atau *business plan* dapat dijadikan *blue print* dalam memulai berbisnis. Perusahaan yang akan dibuat memiliki tujuan apa (visi)? Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut? Siapa saja anggota tim yang terlibat? Kapan bisnis dapat memulai memenuhi tujuannya?

Berikut ini 8 alasan, untuk membuat rencana bisnis atau business plan:

- Kejelasan bisnis yang akan dikerjakan.
- Mengetahui struktur dan strategi perusahaan.
- Mendapatkan penjelasan detail mengenai pasar.
- Mengetahui cara memasarkan bisnis.
- Menggali ide atau pemikiran awal.
- Mengetes perhitungan bisnis
- Mempertajam sistem operasional
- Mengetahui Pesaing

Di dalam pengelolaan LLTT ini di Kabupaten Sumbawa Barat penerapan Rencana Bisnis tentu saja bukan untuk menjadikan LLTT sebagai jasa pelayanan yang bersifat bisnis semata, tetapi disini dijelaskan konsep berbisnis bisa diterapkan dalam jasa layanan sosial yaitu konsep penerapan menghemat biaya produksi untuk menghasilkan keuntungan sebesar yang diharapkan.

Konsep ini bisa diterapkan dalam layanan social dengan cara pertama menerapkan cara perhitungan retribusi ideal atau terjangkau oleh masyarakat dari seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasional pengelolaan IPLT. Kedua adalah penerapan harga retribusi ideal tsb terhadap pengelolaan IPLT di masa yang akan datang.

Pengelolaan IPLT dengan konsep LLIT ini adalah penerapan harga retribusi per m<sup>3</sup> kepada pelanggan sesuai kemampuan dan kemauan pelanggan. Kemampuan dan kemauan masyarakat atau pelanggan dapat diketahui dari hasil sosek yang bisa dilakukan setiap saat atau dalam jangka waktu tertentu misalnya setahun sekali.

Untuk melihat penerapan harga retribusi terhadap pengelolaan IPLT di masa yang akan datang adalah dengan cara menerapkan kelayakan finansial, misalnya dengan melihat nilai *Financial Internal Rate of Return* (FIRR) dan *Net Present Value* (NPV)

FIRR adalah persentase tingkat pengembalian finansial internal dalam pengelolaan keuangan yang dibandingkan dengan tingkat bunga diskonto atau tingkat bunga yang berlaku.  $IRR > DF$  dapat dikatakan LAYAK. *Net Present Value* (NPV) adalah besaran perkiraan investasi di masa akan datang yang dinilai pada masa kini.  $NPV > 0$  atau positif adalah dapat dikatakan nilai investasi saat ini dapat berkembang di saat masa datang. Kelayakan finansial dapat diperoleh bila  $IRR > DF$  dan  $NPV > 0$ , sedangkan apabila  $IRR < DF$  tetapi  $NPV > 0$  dapat dikatakan bahwa usaha atau jasa tersebut Layak sebagai jasa atau layanan sosial.

Dimana:

$C_1$  = net cash inflow during the period  $t$

$C_0$  = total initial investment costs

$r$  = discount rate, and

$t$  = number of time periods

Analisis Internal Rate of Return (IRR):

$1^+$

Keterangan :

$i_1$  = Discount Factor (Tingkat Bunga) pertama di mana diperoleh NPV Positif

$i_2$  = Discount Factor (Tingkat Bunga) ke dua di mana diperoleh NPV Negatif

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, jika di Kabupaten Sumbawa Barat diterapkan retribusi sebesar Rp. 12.000,- ternyata menghasilkan nilai  $IRR < DF$  dan NPV positif sebagaimana diperlihatkan pada gambar tabel berikut.

Untuk menghasilkan nilai kelayakan yang lebih baik diperlukan langkah-langkah atau upaya untuk menaikkan jumlah pelanggan dan atau meningkatkan nilai retribusi. Langkah tersebut dimulai dengan memperbaiki pencatatan finansial dengan lebih baik dan teliti.

## **4.7 RENCANA PENGEMBANGAN ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT & SWASTA**

### **4.7.1 Kemauan dan Kemampuan Membayar Masyarakat**

Dukungan warga untuk penyedotan tangki septik secara teratur (LLTT) harus diukur dari pengetahuan dan sikapnya terhadap LLTT. Dari sisi pengetahuan, seberapa besar masyarakat mengetahui perlunya pengurasan tangki septik secara teratur dan seberapa banyak masyarakat menyatakan setuju dengan penyedotan secara teratur. Selain itu, seberapa banyak masyarakat yang bersedia melakukan penyedotan rutin. Begitu juga perlu diukur kemauan dan kemampuan masyarakat membayar (*willingness to pay* dan *ability to pay*). Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas PUPR PP dan UPTD PALD perlu melakukan survey SOSEK guna mendapatkan gambaran kondisi social dan ekonomi masyarakat, guna memastikan program L2T2 bisa dijalankan. Sehingga bisa diidentifikasi kegiatan apa yang diperlukan untuk mendorong pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap program L2T2.

### **4.7.2 Kerja Sama dengan Swasta**

Peran serta masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal pengelolaan air limbah, khususnya lumpur tinja masih berupa potensi yang belum dioptimalkan. Sehingga belum menarik partisipasi swasta untuk berbisnis dalam layanan penyedotan WC. Langkah ke depan perlu diciptakan kondisi yang mendukung (*enabling environment*) pelibatan sector swasta dalam usaha layanan sedot tinja.

## BAB 5

# RENCANA IMPLEMENTASI LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2)

### 5.1 MEKANISME RENCANA UJI COBA LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2)

Uji coba layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) dimaksudkan untuk menemukan pola terbaik dalam pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal di suatu daerah, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Uji coba operasional dimulai dengan menyusun mekanisme rencana uji coba. Diagram alur Mekanisme Uji coba Operasional LLTT dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Gambar 5.1 Diagram Mekanisme Uji Coba Operasional LLTT di Kabupaten Sumbawa Barat



Kegiatan awal pelaksanaan uji coba operasional LLTT dimulai dengan Penentuan Lokasi prioritas yang akan dijadikan Pilot Project, dilanjutkan dengan pembentukan Tim Sosialisasi yang terdiri dari Pokja AMPL yang dikoordinir oleh pihak lembaga pengelola layanan yaitu UPTD PALD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Bidang Cipta Karya pada Seksi Penyediaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Sumbawa Barat. Di dalam SK Tim Sosialisasi dirumuskan tugas dan peran dari OPD terkait dalam pelaksanaan operasional LLTT.

Tahap selanjutnya dilaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat wilayah prioritas yang dilanjutkan dengan kesediaan ikut serta dalam kegiatan LLTT yang disebut dengan Calon Pelanggan.

Setelah diperoleh data calon pelanggan LLTT, tahap selanjutnya adalah Pendataan Calon Pelanggan yang didalamnya berisi juga Pendataan Tangki Septik. Tahap selanjutnya adalah penentuan rute dan jadwal pelaksanaan untuk uji coba penyedotan, kemudian diakhiri dengan penyedotan.

Secara rinci mekanisme rencana pelaksanaan uji coba LLTT di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

#### 5.1.1 Sosialisasi

Dalam Pelaksanaan Optimalisasi LLTT tahun 2021 Pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat oleh UPTD PALD mengalokasikan anggaran sebesar ..... rupiah, yang dapat digunakan untuk melak-

sanakan 3(tiga) kegiatan yaitu kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Survey/Pendataan Pelanggan dan Kegiatan Uji Coba LLTT dan Layanan Sedot Tinja lanjutan. Dalam pelaksanaan Uji Coba Penyedotan dilaksanakan menggunakan 1 Unit Truk Tinja Kapasitas 3 M3 dalam 1 hari melakukan 2 ritasi dan dalam 1 ritasi melayani penyedotan 3 KK sehingga masing-masing KK disedot 1 M3. Belum ada Perda Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang mengatur besaran retribusi jasa sedot WC, sehingga dalam Uji Coba Penyedotan LLTT skala terbatas (pilot), masyarakat tidak dibebankan biaya penyedotan (gratis) dengan tujuan untuk menarik antusias warga menjadi pelanggan dan menjadi kader sanitasi terutama program LLTT menuju sanitasi aman di Kabupaten Sumbawa Barat.

Penetapan Lokasi Prioritas untuk kegiatan LLTT 2021 yang disepakati dalam Rapat Koordinasi di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu meliputi:

- a. Uji coba skala terbatas, dilakukan di Kelurahan Bugis dan Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang, dimana terdapat 153 KK/rumah yang menjadi penerima manfaat Uji Coba LLTT skala terbatas/pilot, dengan alokasi masing-masing, Kelurahan Bugis sebanyak 50 KK penerima manfaat dan Kelurahan Sampir sebanyak 103 KK penerima manfaat.
- b. Layanan LLTT *scaling-up*, yaitu layanan LLTT reguler setelah evaluasi Uji Coba Layanan LLTT skala terbatas.

### 1.1.2 Pemilihan Lokasi

Dalam Pelaksanaan LLTT, dalam *Focus Group Discussion (FGD)* Pokja AMPL Kabupaten Sumbawa Barat telah menyepakati beberapa kriteria prioritas yang akan menjadi kelompok sasaran penerima manfaat yaitu:

1. Rumah tangga penerima manfaat bantuan tangki septik program Hibah Air Limbah Setempat tahun 2017 hingga 2019, dengan total sebanyak 18.580 Ruamah Tangga.
2. Jarak IPLT ke wilayah layanan dan aksesibilitas
3. Jumlah pelanggan yang pernah dilakukan penyedotan
4. Peruntukan bangunan
5. Resiko sanitasi
6. Ketersediaan lembaga masyarakat pengelola & pemanfaat ALD

Berdasarkan analisa prioritas tersebut (analisa prioritas terlampir), maka penetapan Lokasi Prioritas untuk kegiatan Uji Coba LLTT tahun 2021 yang disepakati dalam FGD Pokja AMPL Kabupaten Sumbawa Barat yaitu warga masyarakat penerima bantuan tangki septik program Hibah Air Limbah Setempat tahun 2017 di wilayah Kecamatan Taliwang, Kelurahan Bugis dan Kelurahan Sampir dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 240 KK (atau 120 KK di masing-masing kelurahan).

### 1.1.3 Pembagian Peran dan Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi diawali dengan pembentukan Tim Sosialisasi L2T2 Kabupaten Sumbawa Barat yang beranggotakan anggota Pokja AMPL dari OPD terkait diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman (PUPRPP), Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan UPTD PALD. Tim Sosialisasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPRPP dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Struktur Tim Sosialisasi L2T2

No	Unsur Dinas	Jabatan Tim	Keterangan
1	Kabid Cipta Karya DPUPR PP	Ketua Tim	
2	Kasie Kesling Dinas Kesehatan	Sekretaris	
3	Kasie Penyediaan Sarpras AM & AL	Anggota	
4	Ka UPTD PALD	Anggota	
5	Kabag TU UPTD PALD	Anggota	

Setelah Tim Sosialisasi terbentuk, perlu segera disepakati pula mengenai jadwal sosialisasi, lokasi sosialisasi serta perihal materi sosialisasi dan peralatan pendukung seperti leaflet, spanduk dan brosur maupun kuesioner survey.

#### 5.1.4 Pendataan Pelanggan

Kegiatan Pendataan Pelanggan LLTT di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan oleh enumerator, yang tugasnya tidak hanya melakukan pendataan calon pelanggan, enumerator pun memberikan edukasi terkait Tangki Septik yang aman.

Tabel 5.2 Data Calon Pelanggan Penyedotan di Lokasi Uji Coba LLTT 2021 (Daftar Panjang)

No	Nama Masyarakat Penerima Bantuan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	unit	Jumlah
1	A. RAHMAN A	BUGIS	TALIWANG	1	50
	DAYA	BUGIS	TALIWANG	1	
	HADENA	BUGIS	TALIWANG	1	
2	A. MENA	BUGIS	TALIWANG	1	
	LAILI	BUGIS	TALIWANG	1	
3	AHMAD ARIF	BUGIS	TALIWANG	1	
	FAIZAL	BUGIS	TALIWANG	1	
	ISMAIL FATAH	BUGIS	TALIWANG	1	
	KAMALUDDIN	BUGIS	TALIWANG	1	
	M. YUSUF	BUGIS	TALIWANG	1	
	MASANGING	BUGIS	TALIWANG	1	
	SAMPUANG	BUGIS	TALIWANG	1	
4	A. HAMID	BUGIS	TALIWANG	1	
	HASNAINI	BUGIS	TALIWANG	1	
	HUSAIN	BUGIS	TALIWANG	1	
	NURJANIF	BUGIS	TALIWANG	1	
	SITI AISYAH	BUGIS	TALIWANG	1	
	TONI	BUGIS	TALIWANG	1	
5	ABDILLAH	BUGIS	TALIWANG	1	
	AHMAD SMA	BUGIS	TALIWANG	1	
	ARDIANSYAH	BUGIS	TALIWANG	1	
	ISMAIL AYUF	BUGIS	TALIWANG	1	
	JAWARIAH	BUGIS	TALIWANG	1	

	JONI SAPUTRA	BUGIS	TALIWANG	1	
	KHOIRI	BUGIS	TALIWANG	1	
	M. YUSUF	BUGIS	TALIWANG	1	
	M. ZAIN	BUGIS	TALIWANG	1	
	MASRI	BUGIS	TALIWANG	1	
6	A. KARIM	BUGIS	TALIWANG	1	
	AWALUDDIN	BUGIS	TALIWANG	1	
	BAMBANG	BUGIS	TALIWANG	1	
	FATIMAH	BUGIS	TALIWANG	1	
	HARIATUS SADIAH	BUGIS	TALIWANG	1	
	IRAWASYAH	BUGIS	TALIWANG	1	
	JAMILAH	BUGIS	TALIWANG	1	
	JAWIYAH	BUGIS	TALIWANG	1	
	L. KHAIRI	BUGIS	TALIWANG	1	
	M. ALI	BUGIS	TALIWANG	1	
	MA'AH	BUGIS	TALIWANG	1	
	MAHNAN	BUGIS	TALIWANG	1	
	MAHSUN ISAH	BUGIS	TALIWANG	1	
	MAHSUN ROH	BUGIS	TALIWANG	1	
	MUHAJJAR	BUGIS	TALIWANG	1	
	MUSMULIADI	BUGIS	TALIWANG	1	
	NURDIN/DEK	BUGIS	TALIWANG	1	
	SAHABUDDIN	BUGIS	TALIWANG	1	
	SAHODA	BUGIS	TALIWANG	1	
	SALEHE	BUGIS	TALIWANG	1	
	SALLI	BUGIS	TALIWANG	1	
	SUPRIADI	BUGIS	TALIWANG	1	
7	MEREN	KUANG	TALIWANG	1	45
	AKHYAR RUSADI	KUANG	TALIWANG	1	
	KAMARUDDIN	KUANG	TALIWANG	1	
	L. KARDI	KUANG	TALIWANG	1	
	M. ZAIN	KUANG	TALIWANG	1	
	MARYAM	KUANG	TALIWANG	1	
	MULIADI	KUANG	TALIWANG	1	
	MUNASIB	KUANG	TALIWANG	1	
	RANDIS	KUANG	TALIWANG	1	
	SAHABUDDIN	KUANG	TALIWANG	1	
	USMAN	KUANG	TALIWANG	1	
8	MURTAWANSYAH	KUANG	TALIWANG	1	
	MERAP	KUANG	TALIWANG	1	
	EKA FITRA JAYA	KUANG	TALIWANG	1	
9	ARIFIN	KUANG	TALIWANG	1	

	SYAMSUL BAHRI	KUANG	TALIWANG	1	
	LIKMAN HALFAN	KUANG	TALIWANG	1	
	A. HADI SYAFARUDDIN	KUANG	TALIWANG	1	
	AGUS TAKARYANTO	KUANG	TALIWANG	1	
	M. SAID	KUANG	TALIWANG	1	
	MUHAMMAD ANWAR	KUANG	TALIWANG	1	
	NURIFANSYAH	KUANG	TALIWANG	1	
	SAHNAN	KUANG	TALIWANG	1	
	SUPRIADI	KUANG	TALIWANG	1	
	SUWANDI	KUANG	TALIWANG	1	
	ARIFIN	KUANG	TALIWANG	1	
	SYAMSUL BAHRI	KUANG	TALIWANG	1	
	LIKMAN HALFAN	KUANG	TALIWANG	1	
	A. HADI SYAFARUDDIN	KUANG	TALIWANG	1	
	AGUS TAKARYANTO	KUANG	TALIWANG	1	
	M. SAID	KUANG	TALIWANG	1	
	MUHAMMAD ANWAR	KUANG	TALIWANG	1	
	NURIFANSYAH	KUANG	TALIWANG	1	
	SAHNAN	KUANG	TALIWANG	1	
	SUPRIADI	KUANG	TALIWANG	1	
	SUWANDI	KUANG	TALIWANG	1	
10	MAWARDI	KUANG	TALIWANG	1	
11	INDRA	KUANG	TALIWANG	1	
	A. RIFAI	KUANG	TALIWANG	1	
	H. HASAN NENG	KUANG	TALIWANG	1	
12	MUSLIMIN	KUANG	TALIWANG	1	
13	MUSTAJAB	KUANG	TALIWANG	1	
	MUSA	KUANG	TALIWANG	1	
	USMAN H. MAKASAU	KUANG	TALIWANG	1	
14	BUDIANTO	KUANG	TALIWANG	1	
	SRI JAWAHER	KUANG	TALIWANG	1	
15	M. NUR	SAMPIR	TALIWANG	1	46
	M. SALEH IDI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SAKINAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HJ. FATIMAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	H. SUDIRMAN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ROY ILHAM	SAMPIR	TALIWANG	1	
	NURMAYANTI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	BIDA	SAMPIR	TALIWANG	1	
	M. YUSUF AYUP	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ITI ODA	SAMPIR	TALIWANG	1	
	IKA NENING	SAMPIR	TALIWANG	1	

	SATIJA UDENG	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HAWIYAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
16	HADENAN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ABDUL RAZAK	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AHADI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	MANSYUR	SAMPIR	TALIWANG	1	
	M. SALEH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HADIJAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AIDAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SUMARNI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SITI CALI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	A. GANI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	MUSTAFA	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ABIDIN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HASAN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	MUHAMMAD	SAMPIR	TALIWANG	1	
	M. SALEH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AHEM	SAMPIR	TALIWANG	1	
	A. MAJID	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SADAN ACING	SAMPIR	TALIWANG	1	
	RABAIYAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	M. NUR	SAMPIR	TALIWANG	1	
	M. ALI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	MARIAM	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AHMAD	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ADAM FEDIL	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AGUS SALIM	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AHMAD YANI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	BUSRAN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	FAUSIAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	H. USIN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HARDINO	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HERMAN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HORMAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	JIBRIL	SAMPIR	TALIWANG	1	
	M. SALEH ISMAIL	SAMPIR	TALIWANG	1	
	MAHANI	SAMPIR	TALIWANG	1	
17	SAHARUDDIN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	EKY APRIANTO	SAMPIR	TALIWANG	1	
	MASITA	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ARASAK	SAMPIR	TALIWANG	1	
	BAMBANG HR	SAMPIR	TALIWANG	1	

	PATIMAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	M NUR	SAMPIR	TALIWANG	1	
18	RIDWAN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	DAHLAN SULAIMAN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	JAMALUDDIN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SANAPIAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SAFRUDDIN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	M. NUR BIN AHMAD	SAMPIR	TALIWANG	1	
	MUHAMMAD M. TAHIR	SAMPIR	TALIWANG	1	
	BAHASIN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SYAHRUDDIN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	IRWANSYAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AHMAD BIN ISKANDAR	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ABDUL WAHAB	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SYAHABUDDIN ISMAIL	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AHRIANTO	SAMPIR	TALIWANG	1	
	PIADI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HAPSAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	M. TAHIR	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SYARIFUDDIN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SOFYAN A. GANI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	DARSONO	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AZIS M. TAHIR	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ISWANTO	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ABDUL KADIR	SAMPIR	TALIWANG	1	
	DAHLAN M. ZAIN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AHMAD JAFAR	SAMPIR	TALIWANG	1	
	RABAIYAH	SAMPIR	TALIWANG	1	
	IA ANDU	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AHMAD	SAMPIR	TALIWANG	1	
	MARIAM	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ISKANDAR JALA	SAMPIR	TALIWANG	1	
19	A. GANI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	WANDI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ERNAWATI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SUDIMAN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	M. KADIR	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HUSIN AHMAD	SAMPIR	TALIWANG	1	
	A. RAZAK IDRIS	SAMPIR	TALIWANG	1	
	MUSTAFA B	SAMPIR	TALIWANG	1	
	JAYADI B	SAMPIR	TALIWANG	1	
	JOHARDI	SAMPIR	TALIWANG	1	

	MAMI KUSMAYADI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HAMID SYIHAB	SAMPIR	TALIWANG	1	
	A. GANI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ARIFIN A. GANI	SAMPIR	TALIWANG	1	
	SATIJA YAKOB	SAMPIR	TALIWANG	1	
	ZAINUDDIN	SAMPIR	TALIWANG	1	
	HALIMAH HAMIT	SAMPIR	TALIWANG	1	
	AHMAD ISMAIL	SAMPIR	TALIWANG	1	

Sumber : Hasil Survei Pendataan UPTD PALD DPUPR PP, 2020

### 5.1.5 Peran Lintas Pemangku Kepentingan

Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lumpur tinja maka perlu dilaksanakan sosialisasi dan edukasi. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini perlu melibatkan berbagai pihak secara lintas sektoral sebagai tim.

DPUPRPP Bidang Cipta Karya Kabupaten Sumbawa Barat berperan melakukan pembentukan Tim Sosialisasi. Tim Sosialisasi bisa melibatkan personil lintas OPD dan anggota Pokja AMPL Kab. Sumbawa Barat, dengan pembagian peran sebagai berikut:

- DPUPR PP Bidang Cipta Karya berperan dalam memberikan sosialisasi mengenai perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah sesuai Standar Nasional Indonesia, khususnya terkait standard teknis pembangunan sarana Tangki Septik (SNI 03 2398 2002) agar tidak terjadi pencemaran, selain itu untuk jenis bangunan rumah baru diwajibkan dilengkapi Tangki Septik SNI dan persyaratan tersebut tertera di IMB.
- Dinas Kesehatan memberikan sosialisasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan macam bakteri pencemar dari limbah domestik.
- Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan bagi kelangsungan kehidupan.
- Bappelitbangda memberikan sosialisasi mengenai kebijakan pembangunan sanitasi, serta target RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat terkait pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik..

## 5.2 RENCANA PELAKSANAAN UJI COBA SKALA TERBATAS

Pelaksanaan Uji Coba LLTT 2021 Kabupaten Sumbawa Barat direncanakan melayani 153 KK, dengan menggunakan Truk Tinja kapasitas 3 M3 sebanyak 2 Unit dengan ritasi 2 rit/hari, dengan jumlah pelanggan 3 KK setiap ritasi. Sehingga dalam sehari terdapat 6 KK terlayani uji coba L2T2 tiap truk tinja atau 12 KK untuk 2 truk tinja.

Pendataan dilakukan oleh Tim LLTT Kabupaten Sumbawa Barat (OPD terkait sanitasi yang dibantu oleh tenaga enumerator LLTT) dengan memilih Calon Pelanggan yang mempunyai akses jalan untuk dilalui Truk Tinja, dengan jarak terdekat dengan lokasi IPLT serta merupakan warga penerima Program Hibah Air Limbah Setempat tahun 2017, yang dipastikan tangki septiknya telah sesuai SNI.

Setelah pendataan selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah penetapan jadwal penyedotan. Jadwal penyedotan uji coba dilakukan selama 3 minggu dengan hari kerja selama 6 hari dalam seminggu, jadwal ini dapat disesuaikan dengan jam kerja eksisting di UPTD PALD selaku operator pengelola air limbah di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadwal uji coba berikut ini bersifat kondisional jadi dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan hasil pendataan rencana uji coba skala terbatas (*pilot*), maka diperoleh jadwal penyedotan dan urutan pelanggan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Jadwal Penyedotan Uji Coba LLTT Skala Terbatas (Pilot)

No.	Hari – Truk-1/ Truk-2	Hari ke - Urutan Sedot	Nama Pelanggan	Alamat Lengkap
1	H1 -T1	1-1	A. RAHMAN A	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
2	H1 -T1	1-2	DAYA	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
3	H1 -T1	1-3	HADENA	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
4	H1 -T1	1-4	A. MENA	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
5	H1 -T1	1-5	LAILI	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
6	H1 -T1	1-6	AHMAD ARIF	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
7	H2-T1	2-1	FAIZAL	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
8	H2-T1	2-2	ISMAIL FATAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
9	H2-T1	2-3	KAMALUDDIN	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
10	H2-T1	2-4	M. YUSUF	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
11	H2-T1	2-5	MASANGING	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
12	H2-T1	2-6	SAMPUANG	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
13	H3-T1	3-1	A. HAMID	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
14	H3-T1	3-2	HASNAINI	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
15	H3-T1	3-3	HUSAIN	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
16	H3-T1	3-4	NURJANIF	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
17	H3-T1	3-5	SITI AISYAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
18	H3-T1	3-6	TONI	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
19	H4-T1	4-1	ABDILLAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
20	H4-T1	4-2	AHMAD SMA	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
21	H4-T1	4-3	ARDIANSYAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
22	H4-T1	4-4	ISMAIL AYUF	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
23	H4-T1	4-5	JAWARIAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
24	H4-T1	4-6	JONI SAPUTRA	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
25	H5-T1	5-1	KHOIRI	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
26	H5-T1	5-2	M. YUSUF	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
27	H5-T1	5-3	M. ZAIN	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
28	H5-T1	5-4	MASRI	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
29	H5-T1	5-5	A. KARIM	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
30	H5-T1	5-6	AWALUDDIN	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
31	H6-T1	6-1	BAMBANG	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
32	H6-T1	6-2	FATIMAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
33	H6-T1	6-3	HARIATUS SADIAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
34	H6-T1	6-4	IRAWASYAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
35	H6-T1	6-5	JAMILAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang

36	H6-T1	6-6	JAWIYAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
37	H7-T1	7-1	L. KHAIRI	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
38	H7-T1	7-2	M. ALI	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
39	H7-T1	7-3	MA'AH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
40	H7-T1	7-4	MAHNAN	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
41	H7-T1	7-5	MAHSUN ISAH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
42	H7-T1	7-6	MAHSUN ROH	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
43	H8-T1	8-1	MUHAJJAR	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
44	H8-T1	8-2	MUSMULIADI	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
45	H8-T1	8-3	NURDIN/DEK	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
46	H8-T1	8-4	SAHABUDDIN	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
47	H8-T1	8-5	SAHODA	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
48	H8-T1	8-6	SALEHE	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
49	H9-T1	9-1	SALLI	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
50	H9-T1	9-2	SUPRIADI	Kel. Bugis, Kec. Taliwang
51	H9-T1	9-3	M. NUR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
52	H9-T1	9-4	M. SALEH IDI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
53	H9-T1	9-5	SAKINAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
54	H9-T1	9-6	HJ. FATIMAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
55	H10-T1	10-1	H. SUDIRMAN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
56	H10-T1	10-2	ROY ILHAM	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
57	H10-T1	10-3	NURMAYANTI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
58	H10-T1	10-4	BIDA	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
59	H10-T1	10-5	M. YUSUF AYUP	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
60	H10-T1	10-6	ITI ODA	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
61	H11-T1	11-1	IKA NENING	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
62	H11-T1	11-2	SATIJA UDENG	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
63	H11-T1	11-3	HAWIYAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
64	H11-T1	11-4	HADENAN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
65	H11-T1	11-5	ABDUL RAZAK	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
66	H11-T1	11-6	AHADI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
67	H12-T1	12-1	MANSYUR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
68	H12-T1	12-2	M. SALEH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
69	H12-T1	12-3	HADIJAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
70	H12-T1	12-4	AIDAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
71	H12-T1	12-5	SUMARNI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
72	H12-T1	12-6	SITI CALI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
73	H13-T1	13-1	A. GANI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
74	H13-T1	13-2	MUSTAFA	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
75	H13-T1	13-3	ABIDIN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
76	H13-T1	13-4	HASAN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
77	H13-T1	13-5	MUHAMMAD	Kel. Sampir, Kec. Taliwang

78	H13-T1	13-6	M. SALEH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
79	H1 -T2	1-1	AHEM	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
80	H1 -T2	1-2	A. MAJID	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
81	H1 -T2	1-3	SADAN ACING	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
82	H1 -T2	1-4	RABAIYAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
83	H1 -T2	1-5	M. NUR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
84	H1 -T2	1-6	M. ALI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
85	H2-T2	2-1	MARIAM	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
86	H2-T2	2-2	AHMAD	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
87	H2-T2	2-3	ADAM FEDIL	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
88	H2-T2	2-4	AGUS SALIM	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
89	H2-T2	2-5	AHMAD YANI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
90	H2-T2	2-6	BUSRAN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
91	H3-T2	3-1	FAUSIAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
92	H3-T2	3-2	H. USIN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
93	H3-T2	3-3	HARDINO	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
94	H3-T2	3-4	HERMAN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
95	H3-T2	3-5	HORMAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
96	H3-T2	3-6	JIBRIL	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
97	H4-T2	4-1	M. SALEH ISMAIL	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
98	H4-T2	4-2	MAHANI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
99	H4-T2	4-3	SAHARUDDIN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
100	H4-T2	4-4	EKY APRIANTO	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
101	H4-T2	4-5	MASITA	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
102	H4-T2	4-6	ARASAK	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
103	H5-T2	5-1	BAMBANG HR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
104	H5-T2	5-2	PATIMAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
105	H5-T2	5-3	M NUR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
106	H5-T2	5-4	RIDWAN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
107	H5-T2	5-5	DAHLAN SULAIMAN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
108	H5-T2	5-6	JAMALUDDIN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
109	H6-T2	6-1	SANAPIAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
110	H6-T2	6-2	SAFRUDDIN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
111	H6-T2	6-3	M. NUR BIN AHMAD	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
112	H6-T2	6-4	MUHAMMAD M. TAHIR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
113	H6-T2	6-5	BAHASIN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
114	H6-T2	6-6	SYAHRUDDIN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
115	H7-T2	7-1	IRWANSYAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
116	H7-T2	7-2	AHMAD BIN ISKANDAR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
117	H7-T2	7-3	ABDUL WAHAB	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
118	H7-T2	7-4	SYAHABUDDIN ISMAIL	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
119	H7-T2	7-5	AHRIANTO	Kel. Sampir, Kec. Taliwang

120	H7-T2	7-6	PIADI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
121	H8-T2	8-1	HAPSAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
122	H8-T2	8-2	M. TAHIR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
123	H8-T2	8-3	SYARIFUDDIN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
124	H8-T2	8-4	SOFYAN A. GANI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
125	H8-T2	8-5	DARSONO	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
126	H8-T2	8-6	AZIS M. TAHIR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
127	H9-T2	9-1	ISWANTO	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
128	H9-T2	9-2	ABDUL KADIR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
129	H9-T2	9-3	DAHLAN M. ZAIN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
130	H9-T2	9-4	AHMAD JAFAR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
131	H9-T2	9-5	RABAIYAH	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
132	H9-T2	9-6	IA ANDU	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
133	H10-T2	10-1	AHMAD	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
134	H10-T2	10-2	MARIAM	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
135	H10-T2	10-3	ISKANDAR JALA	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
136	H10-T2	10-4	A. GANI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
137	H10-T2	10-5	WANDI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
138	H10-T2	10-6	ERNAWATI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
139	H11-T2	11-1	SUDIMAN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
140	H11-T2	11-2	M. KADIR	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
141	H11-T2	11-3	HUSIN AHMAD	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
142	H11-T2	11-4	A. RAZAK IDRIS	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
143	H11-T2	11-5	MUSTAFA B	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
144	H11-T2	11-6	JAYADI B	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
145	H12-T2	12-1	JOHARDI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
146	H12-T2	12-2	MAMI KUSMAYADI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
147	H12-T2	12-3	HAMID SYIHAB	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
148	H12-T2	12-4	A. GANI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
149	H12-T2	12-5	ARIFIN A. GANI	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
150	H12-T2	12-6	SATIJA YAKOB	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
151	H13 -T2	1-1	ZAINUDDIN	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
152	H13 -T2	1-2	HALIMAH HAMIT	Kel. Sampir, Kec. Taliwang
153	H13 -T2	1-3	AHMAT ISMAIL	Kel. Sampir, Kec. Taliwang

### 5.3 RENCANA PERLUASAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL

Perluasan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dilakukan setelah Tim Pokja AMPL Kab. Sumbawa Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Coba Layanan Skala Terbatas. Evaluasi dilakukan untuk menilai beberapa aspek pelaksanaan yang akan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan L2T2 skala diperluas, antara lain:

- Efektifitas waktu dan jumlah ritasi ideal per hari
- Kesesuaian biaya operasional dengan target jumlah pelanggan terlayani
- Kesesuaian SOP dengan pelaksanaannya
- Hal-hal lain yang perlu antipasti

Setelah hasil evaluasi dan rekomendasi disusun, selanjutnya UPTD PALD menindaklanjuti rekomendasi tim evaluasi untuk menjadi masukan dalam perencanaan perluasan layanan. Selanjutnya UPTD PALD menyusun jadwal L2T2 tahunan. Jadwal kegiatan meliputi:

- a. Sosialisasi L2T2 di wilayah sasaran
- b. Pendataan pelanggan di wilayah sasaran
- c. Penyusunan daftar final pelanggan L2T2 tahun berjalan
- d. Jadwal penyedotan pelanggan L2T2

Sedangkan jumlah target layanan L2T2 tahunan mengacu pada target capaian strategis, dimana sasaran pelanggan L2T2 difokuskan pada penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat tahun 2017-2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Target Layanan Pelanggan L2T2 dan L2T3 Tahun 2021-2024

No	Target Layanan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	L2T2	3640	3640	7280	10920
2	L2T3*)	438	1273	1342	2272

\*) Untuk layanan L2T3 jumlahnya tentative sesuai permintaan pelanggan

### 5.3.1 Perluasan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal

#### Layanan L2T2 tahun 2021

Rencana Layanan L2T2 tahun 2021 difokuskan pada penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Lokasi sasaran layanan L2T2 tahun 2021

No.	Lokasi/Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pelanggan (KK)
1	Jereweh	4	34
2	Taliwang	15	1.532
3	Seteluk	10	731
4	Sekongkang	7	0
5	Brang Rea	9	0
6	Poto Tano	8	1.023
7	Brang Ene	6	0
8	Maluk	5	320
Total			3.640

Layanan L2T2 tahun 2021 terbagi atas 2(dua) katagori dengan jumlah pelanggan masing-masing:

- Layanan skala terbatas = 153 pelanggan (KK)
- Layanan diperluas = 3.487 pelanggan (KK)

#### Layanan L2T2 tahun 2022

Rencana Layanan L2T2 tahun 2022 difokuskan pada penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat tahun 2017 yang belum terlayani di tahun 2021 dan penerima manfaat Program Hibah tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.6 Lokasi sasaran layanan L2T2 tahun 2022

No.	Lokasi/Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pelanggan (KK)
1	Jereweh	4	236
2	Taliwang	15	1.782
3	Seteluk	10	39
4	Sekongkang	7	557
5	Brang Rea	9	708
6	Poto Tano	8	0
7	Brang Ene	6	218
8	Maluk	5	0
<b>Total</b>			<b>3.640</b>

*Layanan L2T2 tahun 2023*

Rencana Layanan L2T2 tahun 2023 difokuskan pada penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat tahun 2018 yang belum terlayani di tahun 2022 dan penerima manfaat Program Hibah tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.7 Lokasi sasaran layanan L2T2 tahun 2023

No.	Lokasi/Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pelanggan (KK)
1	Jereweh	4	288
2	Taliwang	15	3.168
3	Seteluk	10	1.453
4	Sekongkang	7	248
5	Brang Rea	9	474
6	Poto Tano	8	763
7	Brang Ene	6	371
8	Maluk	5	515
<b>Total</b>			<b>7.280</b>

*Layanan L2T2 tahun 2024*

Rencana Layanan L2T2 tahun 2024 difokuskan pada penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat tahun 2019 yang belum terlayani di tahun 2023 dan rencana penerima manfaat Program Hibah tahun 2021 dan pelanggan L2T2 terlayani tahun 2021 (siklus ke-2 L2T2) sebagai berikut:

Tabel 5.8 Lokasi sasaran layanan L2T2 tahun 2024

No.	Lokasi/Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pelanggan (KK)
1	Jereweh	4	354 (+34)
2	Taliwang	15	(+1.532)
3	Seteluk	10	730 (+731)
4	Sekongkang	7	246
5	Brang Rea	9	508
6	Poto Tano	8	1.160 (+1.023)
7	Brang Ene	6	342
8	Maluk	5	780 (+320)
<b>Total</b>			<b>7.760</b>

Pada tahun 2024 layanan L2T2 ditargetkan mampu melayani 10.920 KK. Sehingga sisa sasaran layanan L2T2 pada tahun 2024 akan dialokasikan bagi masyarakat calon penerima program Hibah Air Limbah Setempat tahun 2021 sebanyak =  $10.920 - 7.760 = 3.160$  KK.



## **BAB 6**

# **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) Kabupaten Sumbawa Barat dimaksudkan agar implementasinya tepat sasaran sesuai arah kebijakan dan tujuan pembangunan sanitasi yang telah direncanakan. Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan menggunakan sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilaian tentang input, proses, output, manfaat dan dampak dari sebuah kegiatan yang telah dilakukan. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini diharapkan akan menjadi panduan atau arahan bagi para pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi guna menjaga keberlanjutan pembangunan sanitasi, khususnya pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

- a. Memantau efisiensi dan efektifitas proses pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme yang telah ada atau mekanisme yang disepakati Pokja AMPL Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Memantau capaian, permasalahan dan kelemahannya;
- c. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian;
- d. Menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi dalam Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).
- e. Memantau kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas L2T2
- f. Menetapkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang terdampak akibat aktifitas layanan L2T2, baik berkaitan dengan standar prosedur, pilihan teknologi dan standar baku mutu.

Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan :

- a. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia;
- b. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati;
- c. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi;
- d. Kelembagaan untuk pemantauan dan evaluasi sanitasi;
- e. Perbaikan SOP layanan;
- f. Rekomendasi pilihan teknologi dan perbaikannya yang sesuai.

---

### **1.1 Lingkup Monitoring dan Evaluasi**

---

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dilakukan terhadap capaian sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang telah disusun untuk untuk pencapaian sasaran tersebut. Berikut format monitoring dan evaluasi yang dilakukan tahunan:

Tabel 6.1: Format Matriks Monev Implementasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)

Percepatan Pencapaian Sanitasi Aman								
Sasaran	Indikator	Data Dasar		Target	Tahun n+1		Tahun n+...(hingga tahun ke 5)	
		Nilai	Sumber & Tahun		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
...	...	...						

## 1.2. Tatalaksana Monitoring dan Evaluasi

Tatalaksana pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas 4 (empat komponen) yaitu:

- Pengembangan atau Penyusunan Indikator Input, Output, dan Outcome. Pengembangan atau penyusunan indikator input, output, dan outcome berfungsi untuk menilai tingkat capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Pengumpulan Data. Pengumpulan data merupakan suatu proses awal dalam kegiatan Monev. Data yang dikumpulkan adalah program, kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah sumber daya manusia yang terlibat, anggaran yang digunakan, sasaran kegiatan dan hasil kegiatan.
- Analisa Data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian, permasalahan dan rencana tindak yang akan dilakukan.
- Pelaporan. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi menyampaikan tiga indikator dan hambatan pencapaian, yaitu deviasi capaian pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) terhadap rencana maupun hasil kualitas lingkungan terhadap baku mutu, potensi penyebab deviasi dan rekomendasi tindak lanjut. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi akan disampaikan kepada Walikota melalui Pokja AMPL Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap kuartal yaitu pada akhir bulan April, Agustus, dan Desember.

Pelaporan berkaitan dengan hasil pemantauan capaian strategis dilaksanakan setiap tahun di bulan Januari/Februari setelah dilaksanakannya usulan kegiatan dalam Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) ke dalam proses perencanaan dan penganggaran reguler. Pelaporan capaian strategis tahunan ini hanya melaporkan tingkat kontribusi program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan sanitasi. Berikut ini adalah format Tatacara Monev implementasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan tiap tahun, sebagai berikut:

Tabel 6.2: Format Tatalaksana Monev Pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)

Obyek Pemantauan	Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan	
	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/ Pemantau		Penerima Laporan	Format

